

BAB III

DEKONSTRUKSI IDENTITAS PEREMPUAN MELALUI FEMINIS POLITIK

3.1 IDENTITAS PEREMPUAN dalam SISTEM POLITIK

Telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa persoalan perempuan dalam politik tidak hanya berada pada persoalan seksual dan tekstual saja namun memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Selain itu, pencapaian identitas perempuan dalam politik telah mengalami ketertundaan dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan untuk dapat memasuki gerbang politik saja perempuan terlebih dahulu harus melewati sebuah perjuangan panjang baik secara teoritis maupun praktis. Perempuan dalam politik mendapat kedudukan yang terpinggirkan bahkan diremehkan, banyak sekali pernyataan-pernyataan terlontar (baik pada masa klasik maupun masa modern) yang menunjukkan bahwa politik hanyalah milik laki-laki seperti yang dilontarkan oleh Bernard Baruch (1870-1965): *"Vote for the man who promises least; he'll be the last disappointing"*, Bernard adalah seorang pemain di pasar bursa, komoditas dan juga menjadi penasihat bagi beberapa Presiden Amerika Serikat, seperti: Woodrow Wilson dan John F Kennedy. Sekilas mungkin pernyataan Baruch benar dalam logika bahwa semakin sedikit pemimpin yang memberi janji maka semakin sedikit kemungkinan ia tidak ditepati daripada bertumpuk janji, namun Baruch mengidealkan bahwa yang pantas menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki, bukan perempuan.

Bagi Baruch, perempuan bukanlah orang yang memiliki kemampuan politik yang mampu untuk dapat bertarung dalam kompetisi politik. Sejarah memperlihatkan bahwa perempuan hanya menjadi alat dalam perebutan politik laki-laki, kita dapat melihat bagaimana pernikahan menjadi salah satu cara untuk berdiplomasi. Raja 'A' menikahkan pangeran dengan putri Raja 'Z' dengan harapan wilayah kekuasaan kerajaannya akan semakin luas pada masa pemerintahan sang pangeran nanti. Sebaliknya, penguasa dari wilayah yang lebih

kecil ‘menyerahkan’ putrinya kepada penguasa yang memiliki kekuasaan lebih agar wilayahnya tidak dicaplok. Perempuan juga pernah menjadi bagian dari perampasan perang yang berhak dikuasai secara serakah oleh pemenang perang, seolah-olah perempuan adalah piala yang menyimbolkan keagungan kemenangan dalam suatu persaingan.

Persoalan identitas perempuan muncul disini sebagai hal yang sangat penting dikarenakan identitas memiliki potensi dalam menyertakan kedirian subjek perempuan dalam relasinya baik personal maupun sosial. Persoalan identitas tentu bukanlah persoalan sederhana yang dengan cepat mampu mencapai finalitas, melainkan diperlukan sebuah uraian khusus dalam menentukan kemana arah yang ingin dibawa dalam membongkar identitas perempuan itu sendiri. Dalam hal ini, arah identitas perempuan dibawa ke dalam ruang politik, sebuah pembongkaran identitas perempuan dalam politik. Identitas sendiri mensyaratkan subjek yang penuh dan cukup, sebuah penjabaran diri dengan karakterisasi yang kuat.

Posisi perempuan yang cukup lama terpinggirkan dalam politik berimplikasi pada kurangnya kesadaran perempuan sebagai bagian dari subjek politik, perempuan tidak seharusnya berada “di luar politik” melainkan “di dalam politik”. Pada kenyataannya, aktivitas atau asosiasi yang secara eksistensial memiliki level utama dikarenakan mensurvei semua aktivitas partikular berdasarkan cara pandang yang lebih umum dan menentukan mana yang menjadi lingkup privat dan lingkup publik adalah politik, Aristoteles menggambarkan politik sebagai “*the most sovereign and inclusive of all associations, politics is an integrative experience; all other human acts and occupations are examined in its light and made its subject-matter.*”⁹ Penjelasan tersebut menekankan bahwa semua manusia masuk ke dalam kategori makhluk politik, termasuk perempuan. Akan tetapi, perempuan selama ini diidentikkan dengan simbol dari sesuatu dimana mendevaluasi setiap budaya, sesuatu dimana setiap budaya mendefinisikannya sebagai subjek yang memiliki eksistensi lebih rendah dibanding dirinya sendiri.

Pembentukan identitas tidak terlepas dari faktor luar yang mempengaruhinya, ironisnya faktor luar ini bekerja dalam kerangka patriarkal

⁹ Joan .B, Landes, *Feminism, the Public and the Private*, hal. 53.

sehingga identitas yang didapatkan perempuan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial merupakan identitas yang terus teresresi sebagai subjek yang lemah dan pasif. Sehingga perempuan mendapatkan dirinya bukan dari proses rasionalisasi internal melainkan dari kerangka patriarkal. Tidak terlepas dari politik, identitas dasar yang dimiliki dan harus disadari oleh perempuan adalah identitas mereka sebagai *political being*, *women as political being*. Perempuan sebagai makhluk politik memiliki makna bahwa perempuan turut menempatkan keunikan mereka sebagai manusia dalam kapasitas untuk bernalar, perempuan disini berbicara sebagai perempuan dan berperan sebagai subjek bagi dirinya sendiri serta turut masuk dalam mutasi kultural sosial dan politik.

Mendefinisikan identitas perempuan tentu bukan hal mudah, ada ketakutan bahwa perempuan akan mengalami kesulitan dalam mencapai identitasnya secara murni karena selama ini identitas yang dikenal adalah berasal dari sudut pandang laki-laki, dengan kata lain satu-satunya identitas perempuan yang dikenal adalah identitas perempuan yang maskulin sehingga diperlukan identitas perempuan yang tidak terjebak pada kerangka kerja patriarkal. *Political being* yang penuh dengan jebakan patriarkal namun merupakan identitas alamiah yang dimiliki oleh perempuan dapat menjadi jalan pendobrak dalam melawan dasar-dasar tatanan sosial dan kultural karena perempuan mau tidak mau harus terlibat penuh dalam proses penciptaan politik. Politik sebagai sistem yang bekerja dengan monoseksual dimana laki-laki berbicara kepada laki-laki membuat identitas alamiah perempuan sebagai *political being* tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kondisi subjektivitas perempuan sehingga perempuan dapat memperoleh identitas diri “aku” yang berasal dari wacana mereka sendiri dan bukan dari turunan “saya” laki-laki.

Pembahasan bab ini bergulir pada tahap yang lebih meningkat, penjabaran identitas perempuan pada sebuah sistem politik yang telah begitu melembaga dalam kehidupan masyarakat dunia bahkan dipercaya sebagai sebuah sistem yang mampu menampung segala aspirasi warga negara, yakni sistem politik demokrasi. Demokrasi diidealkan dapat mengartikulasikan identitas laki-laki dan perempuan secara adil (identitas disini merupakan identitas sebagai *political being*). Ada asumsi bahwa demokrasi dapat menjadi sistem politik yang

mampu membuat perempuan mencapai identitasnya sebagai *political being* layaknya laki-laki.

Demokrasi sendiri pertama kali dilaksanakan di Atena, diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Secara etimologinya, demokrasi dapat dilihat dari dua kata, yakni *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), kekuasaan oleh rakyat. Pembicaraan historisitas demokrasi sendiri tidak luput dari tiga filsuf besar Yunani, yakni Sokrates, Plato dan Aristoteles. Sokrates mungkin merupakan prototipe pahlawan demokrasi, namun Sokrates tidak meninggalkan tulisan apa pun sehingga satu-satunya jalan untuk mengetahui pemikiran Sokrates adalah melalui tulisan informasi dari Plato, sehingga pandangan Sokrates mengenai demokrasi amat ditentukan oleh Plato, muridnya. Ulasan mengenai demokrasi dapat dilihat lebih luas dan jelas melalui tulisan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politics*, menurut Aristoteles suatu negara dikatakan baik jika diarahkan kepada kepentingan umum, yakni kepentingan setiap individu. Sedangkan negara yang diarahkan kepada kepentingan penguasa merupakan negara yang buruk. Tiga bentuk negara yang baik menurut Aristoteles adalah monarki, aristokrasi dan "*politeia*", dari ketiga bentuk negara tersebut yang dianggap sebagai negara paling baik adalah "*politeia*". *Politeia* disini dimaksudkan Aristoteles sebagai demokrasi moderat, demokrasi dengan undang-undang dasar. Aristoteles turut menyumbang tiga landasan besar dari suatu negara demokratis, yakni kebebasan pribadi, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan pentingnya kelas menengah yang besar.

Aristoteles juga memberikan pandangan mengenai warga negara, dia menyatakan bahwa warga negara adalah orang yang memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Pada masa itu warga Atena menjadi bagian dari majelis, lembaga, juri yang memutuskan hukuman serta anggota badan-badan politik lainnya yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, ada perbedaan dasar antara praktik demokrasi ala polis Atena dan demokrasi modern, Aristoteles mengatakan bahwa warga negara Atena (yang disebut sebagai *polities*) yang memiliki hak politik adalah mereka yang dalam hidupnya telah cukup diri dan yang tidak termasuk bagian kelompok ini adalah

perempuan, anak-anak, budak dan orang asing. Pada demokrasi modern diasumsikan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik baik laki-laki maupun perempuan (meskipun hal ini terlihat memiliki kesukaran untuk terjadi dengan adil).

Demokrasi dijadikan momok penting dalam upaya pencapaian identitas perempuan karena demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang dianggap cukup ideal untuk diterapkan dalam berbagai konstitusi negara, selain itu demokrasi dianggap pula sebagai sebuah sistem politik tua yang mampu menampung segala perbedaan identitas warga negara. Banyak negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya termasuk Indonesia dan banyak juga tokoh politik maupun feminis politik yang menggunakan demokrasi sebagai sebuah solusi atas persoalan yang ada. Demokrasi begitu diunggulkan serta dielu-elukan karena dianggap sebagai sistem yang berdasarkan suara rakyat, jika berdasarkan suara rakyat maka besar kemungkinan sistem ini akan ideal dan berjalan sesuai dengan apa yang rakyat inginkan. Demokrasi juga menjadi perwujudan dari semangat *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesamaan) dan *fraternite* (persaudaraan). Melawan demokrasi dapat diartikan dengan melawan suara rakyat dan suara rakyat itu adalah kebenaran, suara rakyat adalah suara tuhan "*vox populi, vox dei*".

Selain itu, keunggulan demokrasi lainnya adalah setiap warga negara memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah dan demi kepentingan rakyat itu sendiri. Fokus pada demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan para aristokrat dan diktator yang mengatur rakyat tanpa bisa dikontrol. Pada sistem demokrasi, rakyat sendiri yang memperoleh keuntungan, sedangkan pada sistem non-demokrasi hanya beberapa orang yang memiliki kekuasaan untuk dapat memiliki keuntungan. Namun bagaimana posisi perempuan dalam sebuah sistem demokrasi? Hal ini masih menjadi suatu keraguan karena menerapkan sistem demokrasi bukan berarti secara praktiknya akan terjadi pencapaian demokrasi sebagai suara rakyat. Bahkan suara rakyat disini pun perlu dipertanyakan, suara rakyat manakah yang didengar, apakah suara seluruh rakyat atau hanya suara rakyat laki-laki saja? Perempuan tidak terlibat secara penuh dalam demokrasi, perempuan hanya mengikuti sistem

demokrasi namun mereka tidak dapat menjadi bagian dari makhluk demokrasi itu sendiri.

3.2 PENDEKATAN TEORI FEMINIS POLITIK

Feminis Politik bukan hanya dipakai untuk menjelaskan persoalan utama yang menyangkut hubungan antara perempuan dan politik, namun feminis politik juga hadir untuk mendekonstruksi politik patriarkal serta memberikan jalan keluar dalam pencapaian identitas politik perempuan bahkan berusaha memberi ide alternatif dalam kehidupan politik laki-laki dan perempuan agar identitas keduanya dapat terpenuhi sebagai makhluk politik.

*The most profound and complex problem for political theory and practice is how the bodies of human kind and feminine and masculine individuality can be fully incorporated into political life.*¹⁰

Feminis politik hadir untuk menjawab momok persoalan tersebut, memang pendekatan feminis politik tidak jauh berbeda dengan teori politik lainnya, namun yang menjadi keunggulan teori feminis politik adalah kemampuannya untuk menghasilkan sebuah sistem politik yang adil, tidak hanya bagi perempuan namun bagi setiap warga negara. Feminis politik juga tidak menggunakan *sexual difference* sebagai kriteria yang membedakan porsi laki-laki dan perempuan dalam politik. Berikut penjelasan lebih lanjut yang diwakilkan oleh dua tokoh feminis politik:

3.2.1 Anne Philips

Anne Philips merupakan seorang Profesor Politik Universitas Guildhall, London. Bukunya meliputi *Engendering Democracy* (1991), *Democracy and Difference* (1993), *The Politics of Presence* (1995) dan *Feminist Politics*. Pemaparan Philips mengenai feminis politik merupakan sebuah intisari dari

¹⁰ Carole Pateman, *The Disorder of Women*, hal. 53.

problematika persoalan feminis dan politik. Anne Philips juga mengangkat sebuah ulasan yang sangat menarik, yakni mengenai *Dealing with Difference: A Politics of Ideas or a Politics of Presence?*¹¹. Di dalam ulasan tersebut Philips memiliki keraguan mengenai demokrasi yang berlangsung selama ini, demokrasi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan dua hal yakni, yang direpresentasikan dan yang merepresentasi. Konsekuensi dari demokrasi adalah apa yang akan diwakili kemudian mengambil prioritas melebihi siapa yang diwakili.

Issues of political presence are largely discounted, for when difference is considered in terms of intellectual diversity, it does not much matter who represents the range of ideas. One person may easily stand in for another; there is no additional requirement for the representatives to 'mirror' the characteristics of the person or people represented. What concerns us in the choice of representative is a congruity of political beliefs and ideals, combined perhaps with a superior ability to articulate and register opinions.

[Anne Philips, 1998]

Kualitas dari demokrasi dijamin dengan luasnya hak pilih terhadap semua orang dewasa, setiap laki-laki maupun perempuan yang berkontribusi suaranya pada *opinion* yang menguntungkan untuk publik. Yang biasa terjadi dari banyak otoritas pra-demokrasi adalah peranan politikus untuk membawa pesan. Pesan ini akan bertukar-tukar, tetapi hal ini akan terasa berat dan susah jika pembawa pesannya sama, yakni laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai pembawa pesan, pembawa amanat atas suara-suara yang ingin diwakili dalam pemerintahan, bahkan laki-laki dipercaya memiliki kemampuan politik dalam mengartikulasikan kebijakan dan ide ketimbang perempuan.

Just as a nobleman cannot represent a plebeian and the latter cannot represent a nobleman, so a man, no matter how honest he may be, cannot

¹¹ Landes, *op, cit.*, hal. 475.

*represent a woman. Between the representatives and the represented there must be an absolute identity of interests.*¹²

Anne Phillips melihat adanya tantangan spesifik terhadap politik yang diajukan oleh politik identitas pada hal aktual, yakni institusi demokrasi. Demokrasi liberal secara tradisional didasarkan pada praktek toleransi untuk mengakomodasikan perbedaan, namun bagi Phillips hal itu tidaklah cukup. Phillips sendiri memaknai '*new politics of presence*' sebagai situasi meminta persamaan publik yang tidak hanya merupakan izin terhadap penyimpangan privat. Phillips melihat bahwa toleransi merupakan pengganti yang sangat buruk untuk sebuah rekognisi, kita hanya mentoleransi apa yang kita tidak suka atau menyetujuinya namun perbedaan dibalut dengan identitas, sangat sulit bagi toleransi untuk menerima ini. *Identity politics* memiliki potensi untuk menyatakan secara umum aspek dari diri pribadi kita sendiri, untuk menyelamatkan identitas dari ketidaktahuan sebagai fitur privat dari diri kita. Bagaimanapun, kesulitan pada '*non-negotiable identities*' sama halnya seperti bahan bakar kemarahan dan esensi dari identitas ras, gender, seksualitas ataupun etnis. Untuk mencegah bahaya ini, Phillips mempertimbangkan mekanisme dengan mana demokrasi kontemporer dapat menunjuk persoalan representasi dalam masyarakat heterogen.

Selain berkuat pada kirtik demokrasi, Phillips juga menyuarakan pandangannya mengenai feminis politik. Ada tiga hal utama yang diangkat oleh Phillips dalam persoalan feminis politik, dua diantaranya telah menjadi problema krusial yang terjadi pada tahun 1970-an dan tema yang terakhir merupakan problema yang terjadi di masa ini. Tema yang pertama adalah pemisahan antara ruang publik dan privat dan yang kedua adalah kesalahan definisi politik seperti yang telah terjadi di dalam lapisan masyarakat selama ini. Kedua hal ini diperkenalkan sebagai jalan untuk memahami pengeluaran perempuan dari posisi kewarganegaraan yang penuh. Phillips melihat bahwa perempuan itu dibatasi pada yang privat, pada lapisan domestik dengan kewajiban yang mereka miliki untuk mengurus anak, mengurus rumah dan secara konseptual perempuan dibatasi dengan sebuah *opinion* yang kuat sehingga perempuan hanya dapat diterima

¹² *Ibid.*, hal. 478.

dalam kapasitasnya sebagai istri ataupun ibu dan terus-menerus gagal untuk menyatakan kehadirannya di tempat lain maupun aktivitas lainnya.

Perempuan telah diasosiasikan dengan yang privat dan laki-laki diasosiasikan dengan dunia publik yakni politik dan karir kerja, pemisahan seperti ini telah terjadi sangat lama dan membuat perempuan memiliki prospek yang kecil untuk mengambil tempat layaknya laki-laki sebagai warganegara yang utuh dan memiliki hak yang sama. Memenangkan hak suara dalam politik saja tentu tidak akan cukup untuk membuat perempuan mencapai persamaan seperti yang laki-laki dapatkan, dibutuhkan hal yang lebih fundamental untuk dapat melakukan verifikasi pada pembagian ruang antara publik dan privat yang pada akhirnya akan menghancurkan asosiasi yang terjadi pada gender: laki-laki dan perempuan secara sama dilibatkan dalam dunia kerja, upah kerja yang sama dan secara sama pula dilibatkan serta ditautkan pada dunia politik.

Dalam dunia politik sendiri perempuan telah mendapat status yang terpinggirkan, perempuan telah dikeluarkan, ditiadakan dalam dunia serta aktivitas politik, bahkan perempuan telah ditiadakan sejak politik pertama kali didefinisikan. Politik diterima dan dirasakan pada ruang yang sangat sempit dan diwakili oleh satu term saja, yakni maskulin.

*Women's preoccupations were continually devalued as non-political: where was the politics, we were asked, in trying to achieve a fairer division of household labour, securing women from domestic violence, tackling sexist behaviour or the treatment of women as sex objects? So it was supposed to 'political' to join a socialist group but not to join a consciousness raising group with a bunch of other women; 'political' to demonstrate against the government but not to campaign for more nurseries or the right to abortion; 'political' to attend the meetings of your trade union but laughably irrelevant to object to the sexist language that prevailed in such meetings.*¹³

¹³ *Ibid.*

Dapat saja ada pihak yang mengatakan bahwa perempuan telah dikeluarkan dari apa yang telah secara konvensional diterima sebagai arti dari politik dan dapat juga ada yang mengatakan bahwa aktivis politik perempuan dipandang tidak terlihat dengan anggapan bahwa apa yang telah mereka lakukan bukanlah suatu hal yang menyentuh politik. Dua posisi tersebut telah merangkai suatu kerangka bagi banyaknya diskusi politik yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat dua tantangan yang timbul, yakni pemisahan yang publik dari yang privat dan batasan jalan dimana politik telah didefinisikan. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia dimana laki-laki didefinisikan sebagai pekerja dan pencari nafkah keluarga, sementara perempuan sebagai ibu dan istri. Hal ini berimplikasi pula pada kemerosotan arti dari partai politik dan ditambah dengan kemerosotan pusat dari kelas yang telah memiliki kontribusi yang lebih luas pada pemahaman politik. Orang-orang secara umum lebih banyak berbicara mengenai arti dari pergerakan sosial atau pentingnya asosiasi dalam masyarakat sipil, mereka padukan dengan kritik feminis awal bahwa persoalan politik itu lebih dan melampaui dari apa yang terjadi di parlemen dan partai politik.

Kegagalan untuk menyertakan perempuan sebagai warga negara yang penuh tidak hanya mengenai apa yang terjadi dalam keluarga ataupun pasar pekerja (mereka yang berada dalam struktur: ketidaksamaan, pembatasan atau pengeluaran yang menolak akses yang penuh pada perempuan untuk masuk pada dunia politik), kegagalan kewarganegaraan juga dihubungkan dengan diskursus abstraksi, imparsialitas dan netralitas yang menyatakan dirinya pada ketidaktahuan perbedaan seks dan gender, namun berlangsung dalam cara mengkonfirmasi subjek maskulin sebagai norma. Konvensi dari politik kontemporer telah menyatakan secara tersirat bahwa semua warga negara adalah sama tanpa melihat jenis kelamin maupun ras. Oleh karena itu, tidaklah sepadan untuk fokus pada ketidaktepatan seperti apabila pemimpin X adalah laki-laki atau representasi Y adalah perempuan atau 'isu perempuan' dihadirkan secara parsial, terbatas serta tidak terlalu penting dipahami dalam politik. Pembatasan ini kadang dikenakan dengan landasan yang baik oleh orang yang setuju dengan apa yang mereka ambil untuk menjadi feminis ideal (dimana jenis kelamin seharusnya menjadi hal yang tidak relevan dalam politik). Selain itu, terdapat ide tantangan

bahwa untuk menjadi warga negara yang baik adalah dengan meletakkan salah satu partikularitas kita (gender, etnis, ras) pada satu sisi, tujuannya adalah pemberi suara memilih berdasarkan program yang ada di dalam politik dan tidak akan mengganggu dirinya dengan kandidat yang ada apakah laki-laki ataukah perempuan.

Terdapat dua aspek utama yang ingin dikomentari oleh Philips, yang pertama adalah anggapan terhadap diskursus politik telah memindahkan kita dari wacana politik awal, lebih didasari supratruktur. Sebuah kerangka yang ditujukan untuk pola kehidupan politik sebagai refleksi dari struktur yang lebih dalam di tempat lain. Paradigma awal yang berfokus pada pemisahan publik dari privat menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam politik berada di bawah, sebagai contoh dapat dilihat adanya referensi untuk melanjutkan pembagian jenis kelamin buruh di dalam keluarga dan pasar pekerja. Telah lama perempuan mengemban tanggung jawab utama untuk menjadi pekerja rumah dan pengurus anak, sangat jelas mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara sama dalam politik bersama laki-laki: mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan pertemuan politik ataupun menjadi aktivis partai dan mereka jauh memiliki tingkat kesulitan dibanding laki-laki untuk mempertimbangkan waktu yang penuh untuk karir politik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat perempuan lebih sedikit diwakili daripada laki-laki dalam berbagai macam pekerjaan yang ditujukan pada arah aktivitas politik dan pengaruhnya, keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan politik atau representasinya sangat sedikit. Saat ini yang diperlukan adalah pergerakan yang cepat pada agenda kebijakan dan ini berarti bergerak pada pengeluaran politik dari perempuan dan jenis kelamin.

Prakarsa untuk menghadapi tantangan politik perempuan yang berada di bawah representasi memberikan dua keuntungan menurut Philips. Persoalan gender dalam politik secara partikular diartikan ke dalam sebuah eksklusivitas dengan sebuah usaha menjadikan banyak perempuan untuk masuk ke dalam politik. Hal ini mendorong adanya arah yang berfokus pada hal-hal yang termasuk dalam politik seolah-olah seluruhnya terpisah dari ekonomi dan sosial, sebagai mana adanya pengabaian perbedaan atau peningkatan proporsi perempuan dalam politik. Keuntungan kedua sebagai kritik terhadap kesalahan netralitas dan

kesalahan imparialitas, kemudian merujuk pada suatu hal yang lebih umum 'politics of difference' yang menghubungkan hirarki gender dengan hirarki ras dan etnis, melihat ini sebagai hal yang terhubung tidak hanya sebagai contoh pada ketidaksamaan dan tekanan tapi sebagai contoh tekanan yang turut andil dalam struktur umum.

Hasil yang diperluas oleh feminis politik telah memberikan keuntungan namun juga tidak luput dari resiko. Salah satu resikonya bagi Philips adalah penempatan gender sebagai perpanjangan dari perbedaan (gender, seksualitas, ras, etnis, agama, dan lain-lain), hal ini mengganggu sekaligus mengingatkan daftar panjang pejuang kelas sosial lama yang digunakan untuk mempersiapkan ketika pada akhirnya dipaksa untuk mengakui bahwa kelas tidak hanya membagi.

3.2.2 Chantal Mouffe

Chantal Mouffe setahap lebih maju setingkat dari Anne Philips, dia berusaha mengkritik demokrasi liberal karena baginya demokrasi liberal tidak mampu untuk memahami persoalan yang terjadi pada saat ini dimana dunia saat ini telah dibinasakan oleh etnis, agama dan konflik nasional. Demokrasi liberal tidak mampu menyelesaikan hal tersebut dikarenakan konsep politik yang dimilikinya tidaklah cukup. Dalam bukunya yang berjudul *The Return of the Political*, Mouffe mendukung konsep *radical and plural democracy*, menurutnya ini merupakan satu-satunya konsep yang menarik implikasi yang penuh dari 'pluralism of values' dan dapat menghadapi konsekuensi dari mengetahui ketetapan konflik dan antagonisme.

Bersama Ernesto Laclau dalam buku *Hegemony and Socialist Strategy*, Mouffe mengungkapkan pula sebuah dasar landasan konsep dalam sistem demokrasi yang diusungnya, yakni konsep gerakan kemasyarakatan baru, "new movement". *New movement* merupakan gerakan yang merangkum berbagai gerakan atau perjuangan yang tidak berbasis kelas dan tidak berdasarkan gerakan buruh, seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi, gerakan feminis, gerakan anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, dan gerakan perdamaian.¹⁴ Gagasan ini terkait

¹⁴ Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy*, hal. 159-160.

dengan ide Mouffe mengenai demokrasi yang lebih radikal dan mengakui pluralitas gerakan. Diskursus demokratis mempertanyakan segala bentuk ketidaksetaraan dan subordinasi, oleh karena itu Mouffe mengusulkan untuk menyebut hal itu sebagai gerakan-gerakan kemasyarakatan baru dan gerakan-gerakan demokratik baru karena merupakan kelanjutan dari revolusi demokratik ke bentuk-bentuk subordinasi baru.

Demokrasi merupakan suatu gagasan yang sangat subversif, sebab ia menyela segala diskursus dan segala praktek subordinasi yang ada. Selain pluralitas gerakan, atau *pluralism of subjects*, hal yang paling relevan dari teori Mouffe bagi gerakan perempuan adalah solidaritas di antara gerakan-gerakan demokratik itu. Suatu pengertian demokrasi yang baru juga mensyaratkan bahwa kita melampaui berbagai pengertian hak yang bersifat pribadi dan mengembangkan suatu pengertian solidaritas yang mengikat semuanya. Ini hanya dapat dicapai apabila hak-hak subjek-subjek tertentu tidak dipertahankan mati-matian dengan merugikan hak-hak subjek-subjek yang lain.

Mouffe tidak hanya mendekonstruksi demokrasi liberal tetapi juga menyentuh persoalan feminis politik. Dalam uraian *Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics*, Mouffe menawarkan suatu pemikiran yang lebih maju dan *rasionable*. Pada bagian awal, Mouffe memulainya dengan menguraikan persoalan *identity* dan feminisme; dekonstruksi terhadap *essential identities* (yang mana hal ini merupakan hasil dari pengetahuan akan adanya *contingency* dan kerancuan dari setiap identitas). Dia memandang aksi feminis politik sebagai suatu hal yang tidak mungkin tanpa melihat perempuan sebagai identitas yang koheren, kita tidak melandaskan kemungkinan pergerakan feminis politik dimana perempuan dapat mempersatukan sebagai perempuan dalam usaha untuk memformulasikan dan mengejar tujuan utama feminis. Mouffe menawarkan demokrasi radikal dan plural untuk memenuhi kebutuhan dalam mendirikan rantai kesamaan diantara perbedaan perjuangan demokrasi sehingga nanti akan menciptakan artikulasi yang ekuivalen antara perempuan, kulit hitam, gay dan lainnya.

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh feminisme agar dapat turut serta dalam politik demokrasi, seperti feminis liberal yang telah berjuang untuk hak-hak

baru bagi perempuan sehingga dapat membuat perempuan menjadi warga negara yang sama, tanpa menantang model dari dominasi liberal kewarganegaraan dan politik. Pandangan tersebut mendapat banyak kritik dari feminis lain yang memperdebatkan bahwa konsepsi politik yang hadir adalah milik laki-laki dan fokus perempuan tidak dapat diakomodasikan dalam kerangka seperti itu, sebuah kerangka tunggal laki-laki. Mereka memiliki kecurigaan bahwa liberalisme telah mengkonstruksi bentuk kewarganegaraan modern sebagai ruang publik yang identifikasikan oleh laki-laki dan telah meniadakan perempuan dengan menurunkan perempuan pada ruang privat. Berdasarkan hal tersebut, feminisme harus bekerja keras untuk mendapatkan tipe politik yang dipandu oleh nilai-nilai spesifik seperti cinta, perhatian, pengenalan akan kebutuhan dan persahabatan.

Salah satu usaha yang ditawarkan kaum feminis terhadap problematika politik liberal yang dilandaskan dalam nilai feminin dapat ditemukan dalam 'Maternal Thinking' dan 'Social Feminism'. Feminis politik sendiri dalam pandangan Sara Ruddick dan Jean Bethke Elshtain harus memperlakukan secara khusus identitas 'women as mothers' dan ruang privat dari keluarga. Dalam pandangan ini keluarga memiliki superioritas moral melebihi domain publik politik karena keluarga mendasari humanitas yang kita miliki.

*Family remains the locus of the deepest and most resonant humanities, the most enduring hopes, the most intractable conflicts.*¹⁵

Dalam keluarga terdapat suatu bentuk moralitas politik baru yang dapat menggantikan individualisme liberal dan dalam pengalaman perempuan di ruang privat sebagai ibulah turut muncul model baru dari aktivitas kewarganegaraan. Kategori modern dari individual telah dikonstruksi dalam sebuah postulat universal, homogen 'publik' yang menurunkan segala partikularitas dan perbedaan ke dalam 'privat' dan hal ini memberi konsekuensi yang sangat buruk bagi perempuan. Bagi Mouffe konsep kewarganegaraan modern (kewarganegaraan yang hanya mengakui keberadaan laki-laki) harus diperbaiki, bukan dengan melegalkan perbedaan seksual sebagai politik yang relevan dengan definisi warga

¹⁵ Chantal Mouffe, *The Return of the Political*, hal. 79.

negara melainkan dengan membentuk suatu konsep kewarganegaraan baru dimana perbedaan seksual menjadi suatu hal yang secara efektif tidak relevan.

Tidak ada suatu alasan yang tepat untuk menyangkutkan perbedaan seksual pada segala relasi sosial yang ada. Meskipun begitu, kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan banyaknya praktek perbedaan, diskursus dan institusi yang mengkonstruksi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Tesis yang sebenarnya ingin Mouffe tujukan adalah dalam domain politik dan kewarganegaraan, perbedaan seksual tidak seharusnya dijadikan perbedaan yang valid. Yang dibutuhkan dalam demokrasi radikal dan plural bukanlah model kewarganegaraan atas dasar perbedaan seksual dimana tugas spesifik baik laki-laki maupun perempuan akan dinilai sama namun lebih terarah kepada konsep perbedaan dari *what is to be citizen* dan *to act as a member of a democratic political community*.¹⁶

Persoalan identitas perempuan dalam Mouffe menjadi hal yang tidak kalah penting dalam memudahkan perempuan untuk masuk ke dalam ruang publik. Pelaksanaan dekonstruksi terhadap esensi identitas dilihatnya sebagai kondisi kebutuhan terhadap pemahaman varietas relasi sosial dimana prinsip *liberty* dan *equality* harus diaplikasikan. Hal ini terjadi jika kita membuang pandangan subjek sebagai "agen" (baik rasional dan transparan pada dirinya) dan membuang kesatuan serta homogenitas dari posisinya, setelah itu kita baru mampu untuk berada pada *multiplicity* relasi subordinasi. Individu tunggal dapat menjadi pembawa *multiplicity* dan menjadi dominan dalam satu relasi sementara pada relasi lain memiliki status yang disubordinasikan. Identitas *multiplicity* seperti ini yang dibutuhkan oleh perempuan agar identitas mereka bisa cair, hal ini berimplikasi pada gerak yang bebas bagi perempuan untuk keluar masuk ruang privat dan publik tanpa batasan

Mouffe memiliki gagasan untuk memvisualisasikan feminis politik dengan menghadirkan kesempatan besar terhadap demokrasi politik yang mengarah pada artikulasi dari berbagai macam perjuangan yang berbeda melawan tekanan. Hal yang akan muncul adalah kemungkinan kerja demokrasi plural dan radikal untuk menjadi suatu formula yang sangat cukup, proyek tersebut perlu membuang ide

¹⁶ *Ibid.*, hal. 82.

esensial dari identitas *women as women* seperti halnya usaha untuk melandaskan feminis politik dengan spesifik dan keras. Feminis politik harus dimengerti bukan sebagai bentuk pemisahan dari politik yang dirancang untuk mengejar kepentingan *women as women*, namun lebih sebagai pengejaran gol serta tujuan feminis dalam konteks permintaan artikulasi yang lebih luas. Tujuan ini harus mengandung transformasi dari semua diskursus, praktek dan relasi sosial dimana kategori perempuan dikonstruksi dalam suatu cara yang menyiratkan subordinasi. Feminisme bagi Mouffe merupakan perjuangan untuk persamaan perempuan, tetapi hal ini jangan dimengerti sebagai perjuangan untuk merealisasikan persamaan grup empirik dengan identitas dan esensi umum melainkan lebih kepada perjuangan melawan berbagai bentuk kategori perempuan yang telah dikonstruksi dalam subordinasi.

Mouffe percaya bahwa feminis dapat berkontribusi untuk politik, suatu refleksi dalam kondisi menciptakan persamaan yang efektif bagi perempuan. Refleksi tersebut harus dipengaruhi dengan politik yang ada dan tentunya diskursus teoritis. Feminis terikat dengan proyek politik yang tujuannya untuk memperjuangkan perlawanan bentuk subordinasi yang hadir dalam berbagai relasi sosial dan tidak hanya berkuat pada apa yang dihubungkan dengan gender. Hal ini merupakan suatu pendekatan yang memudahkan kita untuk memahami bagaimana subjek itu dikonstruksi melalui perbedaan diskursus dan posisi subjek pasti lebih cukup daripada satu yang mereduksi identitas kita pada satu posisi tunggal (apakah itu kelas, ras ataupun gender).

3.3 PERSOALAN FEMINIS POLITIK

3.3.1 Ruang Privat dan Publik Perempuan

Persoalan privat dan publik merupakan persoalan feminisme yang telah ada sejak lama, disini perempuan diasosiasikan sebagai yang privat dimana tugasnya hanya sebagai pengurus anak dan rumah tangga. Akan tetapi, persoalan privat dan publik perempuan tidak hanya berhenti pada persoalan sederhana seperti itu saja namun memiliki persoalan yang lebih luas dan rumit. Pembatasan

ruang privat dan publik perempuan memberi pengaruh kepada jalan hubungan perempuan untuk dapat berpartisipasi pada segala aktivitas yang terjadi di dalam ruang publik. Ruang publik sendiri merupakan sebuah ruang luas dimana segala aktivitas kehidupan terjadi seperti politik, ekonomi maupun sosial budaya dan ruang publik menjadi salah satu instrumen prasyarat bagi kebebasan politik subjek. Selama ini perempuan tersisihkan dari dunia politik dikarenakan rangkaian konvensi yang sangat kuat mengatur perbedaan antara peran privat dan peran publik perempuan. Perbedaan ini memotong akses perempuan ke lingkup publik sehingga perempuan dipatok terus pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat yang menghabiskan hampir seluruh waktunya setiap hari, seperti yang ditekankan oleh *Louise Ackers* bahwa perempuan terperangkap dalam pekerjaan domestik yang membutuhkan waktu *full-time*. Tanggung jawab domestik yang amat banyak ini membuat mereka sulit untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang 'sesungguhnya' di ranah publik.¹⁷

Feminis memulai penelusuran dengan berfokus pada pemisahan publik dan privat yang terjadi di dalam masyarakat. Feminisme sendiri tidak menciptakan kosa kata publik dan privat, yang mana dalam bahasa sehari-hari kedua hal itu dihubungkan dengan ikatan yang sangat dekat. Term 'publik' menyatakan kebalikan dari 'privat', publik berhubungan dengan orang secara keseluruhan, komunitas, *common good*, berbagai hal terbuka untuk dilihat dan berbagai hal yang dapat diakses dan dibagi oleh semua. Sebaliknya, 'privat' menunjukkan sesuatu yang tertutup dan eksklusif. Oposisi antara publik dan privat merupakan fitur perbedaan lama antara argumen politik liberal dan republik. Liberal mengasosiasikan *privacy* dengan kebebasan: mereka menghargai lapisan privat dan mempertahankan hak individu pada *privacy* yang melawan intervensi yang dilakukan oleh orang lain maupun negara. Sebaliknya, republik menghargai yang privat, yang mereka asosiasikan dengan tubuh dan kebutuhannya, sebagai sesuatu yang berhubungan pada berbagai hal yang letaknya tersembunyi dari pandangan. Pada akhirnya, mereka mengasosiasikan publik dengan kebebasan atau sikap persetujuan dengan yang lain atas nama *common good*.

¹⁷ Louise Ackers, *Shifting Spaces: Women, Citizenship and Migration within the European Union*, hal. 41.

Feminisme tidak memetakan sikap yang pasti pada kedua tradisi tersebut, meskipun demikian, seperti republik, feminis menghargai partisipasi publik dan seperti liberal, mereka melihat kebutuhan untuk memperluas kebebasan personal. Bagaimanapun, dengan memfokuskan perhatian politik pada lapisan privat, feminis telah menantang pengaruh dari pemeliharaan tubuh dan hal-hal seksual yang tidak terlihat dari pandangan dan mereka telah menolak pandangan warisan bahwa kebebasan telah diaplikasikan secara sama pada semua orang atau pada semua aspek yang terdapat dalam diri seseorang. Feminisme telah menunjukkan bagaimana garis antara publik dan privat secara konstan di renegotiasi. Garis antara publik dan privat telah ditarik dan akan dilanjutkan untuk ditarik, sebagaimana yang dikatakan oleh Nancy Fraser bahwa '*not everyone stands in the same relation to privacy and publicity; some have more power than others to draw and defend the line.*'¹⁸

Perbedaan publik dan privat memberikan sebuah lensa berharga untuk dapat melihat isu-isu identitas gender pada satu sisi dan feminis politik pada sisi yang lain. Pertanyaan yang timbul dalam persoalan publik privat adalah apakah pembedaan ini bersifat universal? Dan apakah pembedaan publik privat ini muncul dengan sendirinya atau dibentuk oleh budaya? Dalam essay *Is Female to male as Nature Is to Culture?* Sherry Ortner menunjukkan fakta bahwa perempuan dimana-mana diasosiasikan dengan *nature* daripada *culture*, dimana aktivitasnya lebih imanen, tidak dimediasi dan ditempelkan pada hal-hal. Sebaliknya laki-laki lebih transenden dan transformatif dari seseorang dan objek. Ortner setuju dengan Michelle Rosado dan feminis lainnya yang melihat publik dan privat dipisah dalam semua masyarakat. Ortner menghubungkan perempuan dengan konteks domestik pada identifikasi mereka melalui keteraturan sosial dan budaya yang kurang.

Pada awal tahun 1980-an kelompok feminis '*pro family*' mulai mempertahankan peranan perempuan sebagai ibu sebagai keperluan dasar bagi identitas gender dan kesadaran akan feminis politik. Feminis *pro-family* juga mencoba untuk melindungi dunia privat keluarga dan kehidupan personal dari semua gangguan politik, baik itu dari kebijakan negara atau politisasi feminis dari

¹⁸ Landes, *op. cit.*, hal. 3.

ruang personal. Jean Bethke Elshtain dan Mary G. Dietz memiliki objek pada visi maternalis dari aksi politik demokrasi atau diskursus feminis politik. Dietz menuntut feminis maternalis dengan melakukan pembagian dunia secara natural dan secara abstrak ke dalam bidang rangkap yang eror, dimana mereka menyalahkan lawan liberal mereka. Karena hal tersebut, Elshtain mengusulkan sebuah fakta palsu antara eksistensi privat yang 'baik' dan publik yang 'angkuh'. Dietz menghargai pikiran itu sebagai politik yang tandus dan tidak ada buah untuk pengintepretasian lingkup sejarah dari aksi publik perempuan. Ini bukan superioritas dari satu bidang yang melebihi bidang lain, namun sifat dari tindakan politik yang memutuskan karakter dari politik demokrasi. Bahkan ketika perempuan termotivasi untuk melakukan tindakan di publik karena posisi mereka sebagai ibu, perhitungannya adalah bagaimana mereka dapat melakukan tindakan untuk mentransformasi perhatian privat mereka ke dalam persoalan publik.

Dietz menyebut teori feminis politik tidak *conflate* dengan kehidupan publik demokrasi, dengan politik statis birokratis atau dengan nilai keakraban. Argumennya disusun untuk melanjutkan keterikatan feminis dengan tulisan Jürgen Habermas dan Hannah Arendt, pelopor teori lapisan publik, yang dimulai di tahun 1980 an hingga saat ini. Habermas menekankan pada aksesibilitas, keterbukaan, publisitas demokrasi dan persamaan yang nampak adanya suatu *starting-point* yang cocok untuk orientasi pada *nonstate* lapisan yang mendominasi dari kehidupan publik, seperti Arendt perspektif pada persamaan, kebebasan dan hal-hal baru dalam kehidupan politik. Kedua filsuf tersebut menunjukkan pemisahan antara kehidupan publik dan privat dalam masyarakat modern ke dalam analisis feminis.

Kaum feminis sosialis sebagai kelompok *pro family* menawarkan "*maternal thinking*" sebagai landasan pikiran feminis politik dan penyelesaian problem demokrasi, namun hal ini merupakan suatu hal yang keliru terlebih ketika menyamakan institusi keluarga dengan demokrasi, ikatan antara warga negara tidak sama dengan ikatan kasih sayang antara ibu dan anak, warga negara merupakan persoalan yang secara politik melibatkan satu dengan yang lain. Persoalan warga negara bukanlah hubungan kekeluargaan, warga negara tidak melakukan relasi dengan pola saudara-saudara ataupun ibu-anak. Menjadi warga

negara tidak sama dengan menjadi seorang ibu, perbedaan sosial perempuan ini memerlukan nilai dan ideal dalam praktek material yang berbeda. Ketika perempuan terangsang maupun termotivasi untuk masuk dalam politik dalam peran mereka sebagai ibu harus tinggal dalam politik sebagai warga negara dan melakukan tindakan dengan warga negara lain selayaknya warga negara dan bukan sebagai ibu yang berelasi dengan anaknya.

Maternal tidak dapat menjadi *political*, mereka berhubungan dan muncul ke luar dari aktivitas yang spesial, membedakan, tidak seperti yang lain, aktivitas ini tidak seperti aktivitas warga negara, keduanya tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mencakup atribut, kemampuan serta jalan pikiran yang sama. Menjadi ibu, pada dirinya tidaklah memiliki kapasitas kebutuhan sebagai warga negara. Ibu yang baik memiliki kemungkinan menjadi warga negara yang baik, namun mereka yang menjadi ibu (baik) tidak lantas membuat mereka menjadi warga negara yang baik, dua deskripsi perempuan tersebut tidak dapat bertukar tempat

Dalam prosesnya, perempuan mulai dengan merealisasi bahwa mereka tidak hanya seorang ibu namun perempuan yang menjadi bagian dalam politik dengan perempuan lain, baik perempuan yang telah menjadi ibu maupun perempuan yang bukan seorang ibu. Dengan demikian, nilai yang harus dipertahankan perempuan bukanlah nilai seperti *maternal* (pertumbuhan dan pemeliharaan anak) namun nilai politik (kebebasan, persamaan, kekuasaan komunitas). Itulah sebabnya Aristoteles mengatakan bahwa politik memiliki keutamaan dibandingkan aktivitas maupun asosiasi lain. Hal ini pula yang membuat gol dari feminisme harus pada *politicize consciousness* dan bukan *maternalize*.

Pencapaian identitas perempuan sebagai *political being* merupakan identitas yang tidak dilandaskan pada *maternal thinking*. *Political being* mensyaratkan keterlibatan pada publik dan memaksimalkan komunikasi serta penalaran, dengan demikian identitas perempuan sebagai *political being* haruslah memiliki karakter yang cair dan tidak melakukan pembatasan identitas pada dirinya. Identitas yang cair memungkinkan perempuan untuk keluar masuk ruang privat dan publik tanpa adanya penjagalan. Ruang privat dan publik pun harus

memiliki kecairan sehingga tidak membebani baik laki-laki maupun perempuan dalam merealisasikan identitas mereka. Asimilasi perempuan terhadap publik harus diikuti oleh simulasi simultan laki-laki terhadap dunia privat, sehingga tidak hanya kata "ibu rumah tangga" yang bergema namun juga "bapak rumah tangga". Sama pentingnya bagi laki-laki untuk mengembangkan diri personal dan pribadinya sebagaimana penting bagi perempuan untuk mengembangkan diri publik politiknya. Laki-laki yang menyadari hal ini juga menyadari bahwa pembebasan bagi perempuan adalah pembebasan bagi laki-laki, sehingga politik tidak selalu harus identik sebagai milik laki-laki dan laki-laki juga tidak harus mencari "pencari nafkah utama". Laki-laki dan perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam jaringan hubungan familial dan pertemanan yang kental yang dijalin bersama-sama.

Pemisahan antara publik dan privat dalam masyarakat modern menjadi kajian sentral analisis feminis. Bagaimanapun kedua-duanya tidak secara penuh dihadapkan pada peniadaan perempuan dari kehidupan publik atau disangsikan operasi *gender difference*. Namun sekarang ada suatu apresiasi yang hidup dari kategori lapisan publik untuk teori feminis dan belakangan telah membuktikan dengan sangat produktif bagi investigasi feminis dalam dan ke seberang banyak bidang meliputi sejarah, filsafat, sastra, sosiologi, studi budaya dan media.

Membicarakan publik privat tentunya tidak terlepas pula dengan slogan feminisme gelombang kedua "*the personal is political*", Seyla Benhabib mengartikan slogan ini dengan "*No persons, actions or attributes of persons should be excluded from public discussion and decision-making, although the self-determination of privacy must nevertheless remain*".¹⁹ Sementara Anne Philips memandang bahwa setelah ditemukan '*the personal is political*', feminis kemudian berdebat apakah pembagian privat dan publik merupakan fitur universal budaya manusia atau hanya produk sejarah. Mereka menyelidiki tiang penyongkong sejarah pemisahan privat dan publik dan mengamati implikasi ini terhadap budaya dan politik sosial yang ada pada saat ini. Feminis turut menaruh perhatian dalam kategori lapisan publik yang disebabkan oleh beberapa dorongan, baik teori maupun praktis.

¹⁹ *Ibid.*

Hal yang cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ruang privat dan publik adalah dengan tidak melihat kedua hal tersebut sebagai hal yang terpisah dan memiliki kuantitas yang berbeda (dimana publik dianggap jauh lebih unggul dari privat). Perbedaan privat dan publik tidak korespon dengan terpisah ataupun memisahkan lapisan; setiap situasi merupakan pertemuan antara privat dan publik karena setiap agen subjek merupakan privat meskipun tidak pernah bebas dari kondisi publik yang ditentukan oleh prinsip kewarganegaraan. Keinginan, pilihan dan keputusan merupakan privat karena merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap individual, namun pelaksanaan merupakan publik karena mereka harus membayar kondisi yang ditetapkan oleh pemahaman partikular dari prinsip *ethico-political* suatu rejim yang menyediakan 'grammar' dari warga negara.

Kewarganegaraan modern telah dibentuk pada pemisahan antara publik dan privat yang menghadirkan publik sebagai dunia homogenitas dan universalitas dan menurunkan perbedaan pada privat. Kategori individual modern pun telah dikonstruksi dalam pola yang mempostulat universalitas, homogenitas publik yang menurunkan semua partikularitas dan perbedaan pada privat, hal ini memberi konsekuensi yang sangat buruk bagi perempuan. Pemisahan antara privat dan publik mendirikan momen patriarkalisme modern karena pemisahan privat dan publik merupakan pemisahan dari dunia *natural subjection*, perempuan, dari dunia relasi dan individual konvensional, laki-laki. Ruang privat dan publik harus memiliki akses yang terbuka dan transparan sehingga perempuan dapat mudah untuk keluar masuk ke dalamnya tanpa harus menghadapi pembatasan pada ruang privat semata. Identitas perempuan yang cair di bantu dengan ruang privat dan publik yang bebas dari *sexual difference* tentunya akan memudahkan perempuan untuk turut masuk ke dalam publik sesuai dengan kebutuhannya, perempuan juga dapat mengatur waktunya sehingga mereka dapat membagi porsi yang sama rata antara aktivitas ruang privat dan publik.

3.3.2 Status Kewarganegaraan Perempuan

Dasar konsep negara (*state*) dan kewarganegaraan lahir pada masyarakat Yunani kuno dengan filsuf Plato sebagai pencetus gagasannya. Di dalam negara 'polis' (kota), kepentingan negara mengatasi kepentingan individu, dan tidak ada satu

pun yang boleh dirahasiakan. Pengorganisasian polis juga menyebabkan setiap warga negara sederajat, tiap warga negara bisa mengambil bagian dalam urusan negara, namun ada perkecualiannya karena hak kewarganegaraan terbatas bagi kelompok minoritas, yakni kaum pendatang, para budak dan perempuan, mereka dianggap tidak berhak mengambil bagian dalam urusan negara.²⁰ Perempuan kurang diperhitungkan di setiap sendi kebijakan negara, bahkan secara ekstrem Plato menyatakan bahwa tugas perempuan dalam kewarganegaraan itu oleh karena berkaitan dengan peran reproduksinya. Pengambilan keputusan penting dilakukan oleh laki-laki karena sesuai dengan perannya di lingkup publik, yakni "penguasa dan pejuang", sementara perempuan lebih sesuai sebagai pembantu penguasa tersebut, perempuan hanya berfungsi sebagai pelahir anak-anak yang berkualitas bagi negara.²¹

Subjek dari negara dipegang serta dikuasai oleh laki-laki, sementara perempuan terikat kontrak kewarganegaraan (*contract of citizenship*) yang berpola *fraternity* dan *brotherhood*. Beberapa definisi tentang kewarganegaraan menekankan proses timbal balik, yakni antara hak dan kewajiban, tetapi pada prakteknya antara yang hak dan kewajiban sering membingungkan. Hak memilih dalam Pemilu yang harusnya satu hak misalnya, di beberapa negara berubah menjadi kewajiban atau persoalan hak reproduksi dan seksualitas bagi perempuan dibalikkan menjadi kewajiban bagi perempuan, dan lain sebagainya. Kewarganegaraan sendiri sebagai politik 'tidak menyertakan' perempuan (*exclusion*) dan perempuan diposisikan sebagai warga negara kelas dua yang termarjinal (*second-class citizenship*).

Feminis politik Carole Pateman telah menganalisa kewarganegaraan perempuan dalam suatu negara modern melalui perspektif pembagian patriarkal antara ruang privat dan publik. Dia menyalahkan ahli teori dari demokrasi karena mengabaikan pembagian seksual tenaga kerja, sejalan dengan status perempuan yang tidak mandiri.

*Citizenship is a patriarchal category: who a 'citizen' is, what a citizen does and the arena within which he acts have been constructed in the masculine image.*²²

²⁰ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, hal. 21-22.

²¹ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, hal. 12.

²² Mouffe, *op. cit.*, hal. 80.

Meskipun perempuan yang berada pada sistem demokrasi liberal sekarang merupakan bagian dari warga negara, namun kewarganegaraan yang secara formal telah dimenangkan di dalam struktur kekuatan patriarkal yang mana kualitas dan tugas perempuan masih kehilangan nilai. Lebih dari itu, kapasitas yang membedakan perempuan untuk diintegrasikan secara penuh pada dunia kewarganegaraan umum dihadapkan pada apa yang ia sebut '*Wolstonecraft dilemma*': untuk mendapatkan persamaan adalah dengan menerima konsep kewarganegaraan patriarkal yang menyiratkan bahwa perempuan harus menjadi (seperti) laki-laki. Sementara untuk meminta perbedaan atribut, kapasitas serta aktivitas bagi perempuan pada kewarganegaraan adalah untuk meminta suatu hal yang tidak mungkin karena perbedaan tersebut merupakan apa yang telah ditiadakan oleh kewarganegaraan patriarkal.

Pateman melihat solusi terhadap dilemma tersebut dalam sebuah elaborasi konsep '*sexually differentiated*'²³ kewarganegaraan yang akan mengakui *women as women*, dengan tubuh yang mereka punya dan semua yang menjadi simbol mereka. Bagi Pateman diperlukan pemberian signifikan politik pada kapasitas yang kurang pada laki-laki: untuk menciptakan hidup, yakni *motherhood*. Kapasitas ini harus dihargai secara sama dalam politik yang relevan untuk mendefinisikan warga negara sebagai mana biasanya ini dianggap tes final dari suatu kewarganegaraan, yakni kesediaan untuk bertarung dan mati bagi negaranya. Dengan menyatakan nilai politik *motherhood*, Pateman berniat untuk mengalahkan perbedaan ruang privat publik dan berkontribusi untuk mendekonstruksi konsepsi kewarganegaraan patriarkal serta kehidupan privat dan publik. Meskipun begitu, *sexual differentiated* seharusnya tidak dipakai lagi dalam merumuskan identitas kewarganegaraan karena akan mengunggulkan jenis kelamin tertentu. Perempuan memang memerlukan fasilitas spesial sementara untuk menjadikan dirinya sebagai warga negara yang utuh namun tentunya tidak dengan mendominasi dirinya terhadap laki-laki.

Jika Pateman memiliki pandangan kewarganegaraan dalam kerangka '*sexually differentiated*', feminis politik lainnya Iris Young berusaha pula untuk

²³ *Ibid.*

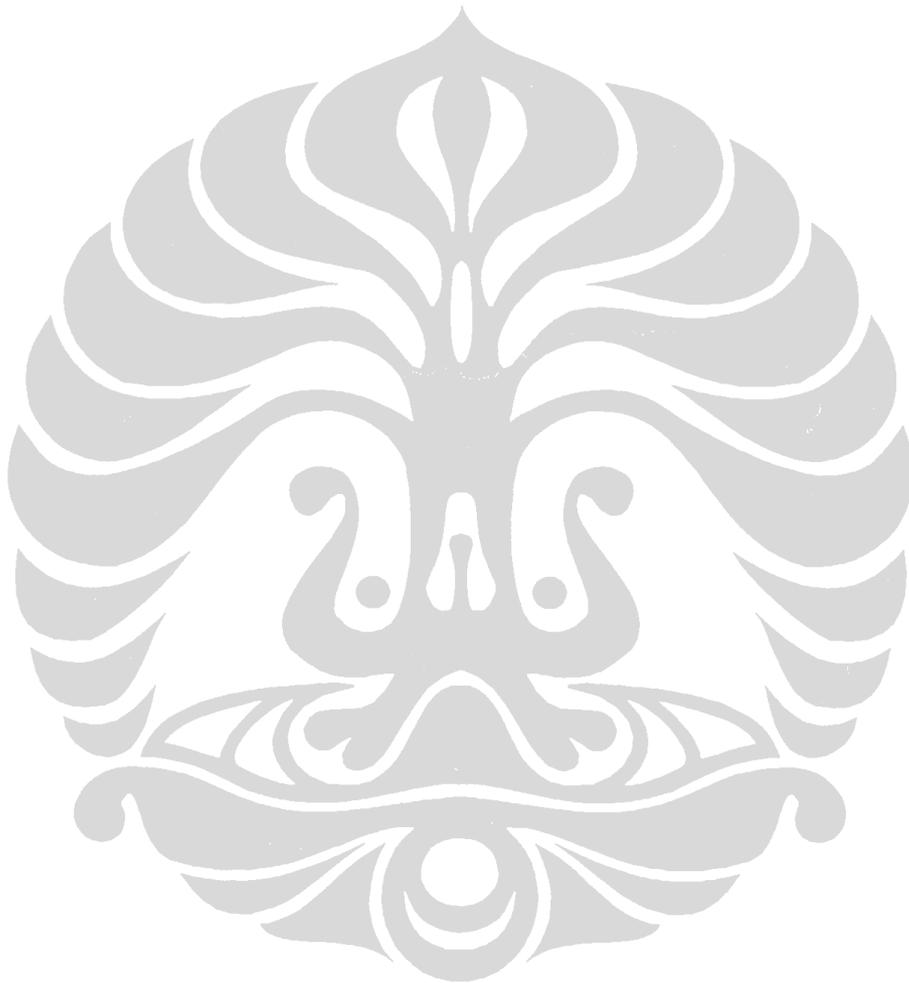
menawarkan suatu ide alternatif pada cara pandang liberal terhadap konsep kewarganegaraan, yakni melalui *group differentiated*.²⁴ Tokoh lainnya Mary G. Dietz memiliki cara pandang yang berbeda dengan Pateman terhadap persoalan kewarganegaraan perempuan. Dietz berpendapat bahwa kewarganegaraan demokrasi dikonstitusi oleh pembedaan ikatan politik antara peniadaan dan pemutusan hubungan yang tidak sama, kendati dermawan atau mencintai, antara ibu dan anaknya. Kewarganegaraan demokrasi haruslah kolektif, inklusif dan general.

Kewarganegaraan sebagai sesuatu yang diperlukan dalam proyek demokrasi dan sistem politik lainnya merupakan bentuk identitas politik yang mengandung identifikasi dengan prinsip politik demokrasi pluralis modern, yakni kebebasan dan persamaan bagi semua. Ini akan menjadi identitas politik umum dari seseorang yang terikat dalam berbagai institusi dan dengan konsepsi *the good* yang berbeda, namun orang yang terikat dengan identifikasi umum maka dia akan diberi interpretasi dari suatu rangkaian nilai *ethico-political*. Kewarganegaraan tidak hanya meliputi satu identitas diantara yang lain, sebagaimana yang ada dalam liberalisme, kewarganegaraan juga tidak meliputi identitas dominan yang mengesampingkan yang lainnya, sebagaimana yang ada dalam republik. Kewarganegaraan mengartikulasikan prinsip yang mempengaruhi posisi subjek yang berbeda dari agen sosial.

Jika kita berpegang pada pandangan bahwa kewarganegaraan terdiri dari pengidentifikasian dengan prinsip *ethico-political* dari demokrasi modern, maka kita harus mengakui bahwa akan ada banyak bentuk kewarganegaraan sebanyak interpretasi terhadap prinsip tersebut, dan interpretasi demokrasi merupakan satu diantara yang lain. Interpretasi demokrasi akan menekankan banyak relasi sosial dimana situasi dominasi yang ada harus ditantang jika prinsip kebebasan dan persamaan diberlakukan. Hal ini perlu didorong ke dalam artikulasi permintaan demokratis yang ditemukan dalam berbagai keterlibatan (seperti Mouffe sebutkan): perempuan, pekerja, kulit hitam, gay, ekologi, seperti halnya yang lain sebagai '*new social movement*'. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu identitas kolektif yang diartikulasikan melalui prinsip demokrasi *equivalence*.

²⁴ Iris Marion Young, *Impartiality and the Civic Public*.

Pandangan kewarganegaraan seharusnya tidak dijadikan sebuah konsepsi yang berdasarkan gender, namun Mouffe melihat ini sebagai sesuatu yang netral, yang mengakui bahwa setiap definisi dari *'we'* mengimplikasikan delimitasi dari *'frontier'* dan tujuan dari *'them'*. Tujuan dari kewarganegaraan demokrasi harus dikonstruksi identitas politik umum yang nantinya akan menciptakan kondisi penetapan dari suatu hegemoni baru yang diartikulasikan melalui relasi sosial, praktik dan institusi egalitarian baru.



BAB IV

POLITIK TERBUKA

4.1 *NATURE CULTURE* MENUJU PRIVAT PUBLIK

Perumusan usaha pencapaian identitas perempuan dalam politik tidak dapat langsung menembak pada perumusan sebuah sistem politik baru yang dapat mengakomodir perempuan, diperlukan sebuah pembongkaran radikal terhadap hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam relasinya terhadap dunia dimana mereka berada. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam realita dunia turut mempengaruhi serta menentukan hubungan mereka dalam situasi politik. Politik (seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya) diasosiasikan sebagai milik laki-laki untuk menyalurkan kekuasaan laki-laki, sekaligus menguasai perempuan. Perempuan dalam politik memiliki kedudukan yang terpinggirkan dan hal ini disebabkan oleh batasan ruang privat dan publik perempuan sehingga perempuan sulit untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bidang politik yang notabeneanya merupakan bidang publik.

Pemisahan ruang privat dan publik ini menjadi sumber persoalan dan memunculkan pertanyaan dari beberapa kaum feminis, apakah pemisahan ruang privat dan publik itu muncul secara alami atau hanya sebuah bentukan budaya? Pertanyaan ini tidak dapat langsung dijawab dengan tergesa-gesa, diperlukan sebuah penyelidikan serta penelusuran yang radikal, yakni melalui mencari akar hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri dalam realita dunia. Hal ini akan berujung pada perbedaan *culture* dan *nature* pada laki-laki dan perempuan, posisi perempuan pada *nature* atau *culture* akan menentukan relasi mereka terhadap laki-laki bahkan persoalan ruang privat dan publik yang berujung pada politik.

Keadaan laki-laki yang selama ini mendominasi politik serta meminggirkan perempuan dalam politik bersumber pada persoalan *nature* dan *culture* mereka. Dikotomi *nature* dan *culture* mengarah kepada perubahan *nature* menuju *culture*, yang mana perempuan selalu diidentikan atau disimbolkan

dengan *nature*, berlawanan dengan laki-laki yang diidentikan dengan *culture*. Dalam proses transformasi dari *nature* ke *culture* seringkali terjadi penaklukan, laki-laki yang digambarkan sebagai *culture* mempunyai wewenang untuk menaklukkan dan memaksakan kehendaknya kepada perempuan (*nature*). Asumsi ini menunjukkan bahwa secara kultural laki-laki memang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Oleh karena itu, ia memiliki “legitimasi” untuk menaklukkan dan memaksa perempuan. Ironisnya setiap budaya mengakui dan memvokalkan perbedaan antara cara kerja *nature* dan cara kerja *culture* (kesadaran manusia dan produknya) ini.

Posisi perempuan lebih didekatkan dengan *nature* dari pada *culture*, hal ini dikarenakan oleh tubuh dan fungsi prokreasi dari diri perempuan itu sendiri. Fisiologi absolut perempuan tersebut dapat dilihat lebih lanjut melalui tiga tingkatan, yakni:

- a) Tubuh perempuan dan fungsinya, lebih banyak waktunya dilibatkan dengan *species life*, hal ini terlihat untuk menempatkan perempuan agar lebih dekat dengan *nature*. Kontras dengan fisiologi laki-laki, yang membebaskan mereka secara penuh untuk mengambil bagian yang besar dalam *culture*.
- b) Tubuh perempuan dan fungsinya menempatkan mereka pada peranan sosial yang pada gilirannya dianggap sebagai urutan yang lebih rendah dalam proses budaya dibanding dengan laki-laki.
- c) Peranan sosial tradisional perempuan, memaksakan karena tubuh dan fungsinya. Hal ini pada akhirnya memberikan mereka struktur psikis yang berbeda dan membuat mereka terlihat lebih dekat dengan *nature*.

Fisiologi perempuan terlihat lebih dekat dengan *nature*, proses dalam tubuh perempuan tidak melayani fungsi nyata untuk kesehatan dan stabilitas dari individu, sebaliknya, mereka melaksanakan fungsi organik spesifik mereka, mereka sering menjadi sumber kegelisahan, sakit dan bahaya. Seperti yang terjadi pada pengeluaran ovarian, proses ini berfungsi demi kepentingan telur,

mempercepat waktu untuk menjadi masak dan mengadaptasikan kandungan tersebut pada kebutuhannya. Dalam bentuk rasa menghargai kepada keseluruhan organisme perempuan memilih untuk membuat ketidakseimbangan dibanding untuk pengaturan perempuan, ini merupakan sikap penyesuaian terhadap kebutuhan telur yang lebih diutamakan ketimbang kebutuhan perempuan sendiri. Dapat pula dilihat dalam proses menstruasi, menstruasi memberi dampak rasa gelisah serta menyakitkan pada diri perempuan, hal ini juga menimbulkan hubungan emosional yang negatif bahkan dalam beberapa kasus mengganggu kinerja pembersihan dan limbah buangan. Banyak budaya menginterupsi rutinitas perempuan, meletakkan perempuan dalam status yang menyertakan berbagai pembatasan pada aktivitas dan kontrak sosial perempuan. Dalam kehamilan pun, banyak dari vitamin perempuan dan sumber daya mineral disalurkan ke dalam zat makanan janin, hal ini tentunya akan menghabiskan energi dan kekebalan tubuh dari perempuan itu sendiri. Pada akhirnya, ketika terjadi kelahiran bayi, perempuan kembali harus merasakan kesakitan yang luar biasa sekaligus menghadapi bahaya.

Badan perempuan semata-mata dipandang hanya karena proses reproduksi yang secara *nature* dimilikinya dan bekerja dengan kerangka yang *nature* pula pada tubuhnya. Seolah-olah perempuan dikutuk hanya terbatas pada proses reproduksi, dimana ia harus berkorban banyak demi kehidupan organisme lain. Sementara laki-laki yang memang memiliki kekurangan pada fungsi prokreasi tubuh yang alami memiliki banyak kesempatan untuk menyatakan kreativitasnya 'secara artifisial' melalui media teknologi dan simbol-simbol. Simone de Beauvoir menyimpulkan keadaan fisiologi perempuan ini dengan menyatakan bahwa

*The female 'is more enslaved to the species than the male, her animality is more manifest".*²⁵

Perempuan hanya dapat menciptakan manusia yang mudah rusak sementara laki-laki dapat menciptakan suatu objek yang abadi. Penjelasan tersebut

²⁵ Landes, *op. cit.*, hal. 239.

membuka jalan pemahaman tentang mengapa aktivitas laki-laki yang menyertakan destruksi hidup (peperangan) dianggap lebih bergengsi dibanding kemampuan perempuan untuk memberi kelahiran dan menciptakan hidup. Sebenarnya bukan pembunuhan yang relevan dan bernilai dari suatu peperangan melainkan ini merupakan transendental (sosial, budaya) *nature* dari aktivitas ini, yang merupakan lawan dari proses kehamilan.

Persoalan berikutnya adalah apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan memang identik dengan *nature* dan bukan *culture*? Meski perempuan memang lebih didekatkan dengan *nature* namun bukan berarti perempuan tidak dapat masuk ke dalam *culture*. Kejadian pada faktor tertentu memang menunjukkan kecenderungan perempuan terhadap *nature*, namun terdapat faktor lain yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan pula dengan *culture*. Laki-laki dimana-mana selalu dihubungkan dengan *culture* dan perempuan didekatkan dengan alam, yang menjadi dasar pemikiran asosiasi ini merupakan pertimbangan implikasi fisiologi yang kontras antara laki-laki dan perempuan. Namun, perlu diingat bahwa perempuan tidak dapat secara keseluruhan diidentikkan dengan *nature*, hal ini dikarenakan perempuan merupakan manusia sama halnya seperti laki-laki, perempuan merupakan manusia utuh yang juga memiliki kesadaran manusia seperti laki-laki dan perempuan juga merupakan bagian dari keseluruhan ras manusia.

Perempuan boleh tampak lebih dekat dengan pemilikan *nature* dibanding laki-laki, namun perempuan mempunyai kesadaran, dia berbicara, berpikir, menghasilkan komunikasi, memvokalkan suara serta menggerakkan lambang, kategori dan nilai-nilai. Perempuan turut mengambil bagian dalam proses komunikasi dialogis yang tidak hanya digunakan kepada sesama perempuan saja namun juga dengan orang lain. Seperti Levi Strauss katakan bahwa

“Woman could never become just a sign and nothing more, since even in a man's world she is still a person, and since insofar as she is defined as a sign she must [still] be recognized as a generator of signs” (1969: 496).

Keterlibatan jasmaniah perempuan lebih dekat dengan fungsi *nature* yang melingkupi reproduksi perempuan, namun karena sebagian keikutsertaannya dan kesadarannya di dalam proses dialog sosial maka dia turut menjadi bagian di dalam *culture*.

Ketubuhan serta fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan tidak seharusnya menjadi alasan untuk meminggirkan perempuan dalam *culture* maupun aktivitas publik. Asumsi bahwa *culture* memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari *nature* merupakan sebuah pernyataan yang perlu diverifikasi secara akurat. Secara kuantitatif dapat dilihat dengan analogi bahwa *nature* memiliki kuantitas 2, sementara *culture* memiliki kuantitas 5, persoalannya adalah bagaimana perbandingan 2:5 ini dapat berubah menjadi 2,5:2,5? Yang terjadi dalam persoalan ini adalah kesalahan dalam memaknai 'perbedaan', perbedaan selalu dimaknai dengan: yang satu akan lebih unggul dari yang lain dan yang lain akan berada pada tingkatan lebih rendah dari yang lainnya. Pola pikir dalam memaknai perbedaan ini perlu dirubah, perbedaan itu bukan persoalan keunggulan dan kelemahan antara yang satu dan yang lain, melainkan persoalan pencerminan karakteristik identitas. Dalam melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan disini selalu dimaknai dengan posisi laki-laki yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan perempuan, laki-laki yang memiliki *culture* sehingga mereka dapat mengrtikulasikan kreativitas mereka dalam media publik.

Perbedaan bukanlah sebuah ajang untuk meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain, melainkan merupakan sebuah harmonisasi yang unik. Namun lagi-lagi, sekalipun perempuan dianggap sebagai 'yang unik', kata unik disini dimasukkan kembali kedalam definisi sebagai pihak 'yang lemah'. Sekalipun ketubuhan dan sistem reproduksi perempuan menunjuk kedekatan pada *nature* bukan berarti ini menunjukkan kelemahan perempuan, melainkan karakteristik yang dimiliki perempuan. Begitu pula dengan laki-laki yang lebih luas bergerak pada *culture* tidak berarti menunjukkan keunggulan, karena baik *culture* maupun *nature* memiliki kelebihan maupun keunggulan yang berbeda dan dalam realita proses kehidupan yang diperlukan adalah harmonisasi antara *nature* dan *culture*.

Kesalahan besar pula jika perempuan yang memiliki *nature* ingin masuk ke dalam *culture* harus merubah identitasnya menjadi seorang laki-laki agar dapat diterima keberadaannya dalam *culture* tersebut. Perempuan tidak harus menjadi laki-laki agar bisa masuk ke dalam *culture* yang identik dengan milik laki-laki, *culture* tidak dapat bersifat tertutup dan menegasi keberadaan perempuan karena jika hal tersebut terjadi maka laki-laki sendiri yang akan mengalami kerugian. *Nature* dan *culture*, dua komposisi yang harus saling melengkapi serta berinteraksi timbal balik tanpa harus melepas identitas karakter masing-masing yang dimiliki dan ini pula yang harus terjadi pada hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan jelas memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing, namun nyatanya laki-laki selalu memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan dengan perempuan. Fisiologi tubuh perempuan yang terfokus pada persoalan reproduksi telah menyita waktu yang sangat banyak dari hidup perempuan dan hal ini pula yang akhirnya membuat perempuan berdiam terlalu lama pada ruang privat untuk mengurus reproduksinya, anaknya serta suaminya, hal ini pula yang membuat perempuan menjadi warga negara ke dua pada suatu negara karena mereka tidak memahami sama sekali lika-liku arena publik terlebih dalam persoalan politik. Perempuan terus dicekoki pada persoalan domestik dan ini membuatnya sulit untuk mengenali dan masuk ke dalam *culture* maupun ruang publik, padahal perempuan memiliki kemampuan kesadaran, komunikasi dialog dan berpikir layaknya laki-laki. Perempuan berhak masuk dan turut ambil bagian dalam *culture* maupun ruang publik, namun kesulitannya adalah cara untuk mentransformasikan diri perempuan dari posisi *nature* maupun privat menuju *culture* maupun publik.

Perempuan harus dipaksa untuk masuk ke dalam *culture* maupun ruang publik, jika hal ini tidak dilakukan maka perempuan akan terjebak pada ruang privat selamanya dan tidak dapat berperan pada publik maupun *culture*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan memiliki kemampuan komunikasi dialogis sehingga dia mampu untuk masuk ke dalam *culture* maupun ruang publik, penyertaan perempuan dalam ruang publik ini turut didukung serta didorong oleh kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh perempuan itu.

Komunikasi dialogis merupakan sebuah cara efektif efisien yang mampu menembak sasaran yang diinginkan, dimana hubungan komunikasi laki-laki dan perempuan yang ada dalam proses ini bukanlah hubungan subjek-objek (laki-laki ke perempuan), melainkan hubungan dialog subjek-subjek. Disini posisi laki-laki dan perempuan menjadi sebanding tanpa ada pihak yang terpinggirkan. Perempuan harus dipandang sebagai subjek dalam ruang publik, bahkan perempuan harus berperan sebagai subjek pada dirinya sehingga dapat mengarahkan dirinya tanpa adanya pengobjekan.

Dalam relasi subjek-subjek, komunikasi mengharapkan adanya dua hal, yakni yang pertama, manusia berhadapan satu sama lain sebagai pihak-pihak yang sejajar dan otonom, dan yang kedua, adanya lahan keleluasaan dan kebebasan dalam menerima maksud pihak lain yang sama sekali tidak dapat dipaksakan. Tindakan-tindakan koordinatif tersebut membuat kesepahaman dan kemengertian subjek dan subjek dapat teraih dimana mana bahasa digunakan sebagai perantaranya. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, suatu orientasi paradigma komunikasi yang tentunya memuat peraihan “*understanding*” (melalui perilaku strategis komunikatif) akan terwujud. Dengan demikian, pada proses komunikasi ini kedudukan laki-laki dan perempuan dihargai sejajar dan perempuan berhak memvokalkan apa yang ingin disuarakannya tanpa ada tekanan dari pihak lain. Ini merupakan sebuah komunikasi terbuka tanpa mengeliminasi sepihak terhadap *opinion* yang muncul ke publik.

Komunikasi yang sehat (menurut Jurgen Habermas) adalah komunikasi dimana setiap partisipan bebas untuk menentang klaim-klaim tanpa ketakutan akan tindakan koersif, intimidasi yang mana tiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat, membuat keputusan-keputusan, berbagai “klaim normatif”, dan juga menentang pendapat subjek lain. Secara teknis, Habermas mengandaikan setiap proses pendapat atau argumentasi mempunyai presuposisi, yang diantaranya, setiap subjek dengan kompetensi untuk berbicara dan bertindak diperkenankan mengambil bagian dalam suatu diskursus; setiap subjek diperbolehkan mempertanyakan setiap *assertions* apa saja; setiap subjek diperbolehkan mengekspresikan perilakunya, keinginan-keinginan, dan kebutuhan-kebutuhannya; setiap subjek diperkenankan mengajukan suatu

keputusan apa saja ke dalam diskursus; tidak dapat satu pun subjek yang bisa dicegah dari hak-haknya baik melalui koersi internal maupun eksternal.

Dari penjelasan di atas secara tersirat jelas diperlukan posisi perempuan yang kuat sebagai subjek dalam proses komunikasi dialog. Komunikasi akan berjalan terbuka dan *fair* jika setiap pihak yang menyatakan pendapatnya dipandang sebagai subjek 'hidup'. Perempuan tidak hanya harus dipaksa untuk masuk ke ruang publik namun juga harus dipaksa untuk menjadi subjek bagi dirinya dan dalam proses komunikasi dialog. Seperti Luce Irigaray katakan bahwa "Perempuan harus berperan sebagai subjek, bukan hanya berucap sebagai perempuan namun juga harus terlibat dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik" dan hal ini yang diperlukan agar perempuan bisa masuk pada ruang publik maupun *culture* yang identik dengan laki-laki.

4.2 KEKUSUTAN POLITIK yang-BERDIAM dalam PUBLIK

Pemisahan ruang privat dan publik yang dilakukan berdasarkan atas *sexual difference* terjadi di dalam konsep kewarganegaraan modern dan hal ini merugikan perempuan untuk bergerak dengan leluasa. Segala aktivitas yang "hidup" berada di dalam ruang publik, tidak berada di ruang privat, politik sendiri berdiam di dalam ruang publik dan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa dalam ruang publik. Seperti telah dijelaskan pada bagian pertama bahwa politik sejak awal memiliki mekanisme tunggal, yakni dirancang oleh laki-laki dan untuk laki-laki, sementara perempuan memiliki posisi yang terpinggirkan dan dikuasai. Persoalan ini meninggalkan jejak-jejak kerumitan yang tentunya perlu dibongkar agar tidak terjadi kekeliruan. Akan tetapi, sebelum melangkah jauh membongkar persoalan ini, langkah awal yang perlu dijalankan dan digerakkan adalah melihat kenyataan benang kusut yang terjadi di dalam tubuh politik itu sendiri. Politik dalam dirinya sendiri memiliki kerumitan yang tidak kalah dengan kerumitan faktual yang berada di luar dirinya. Benang kekusutan serta kerumitan tentunya perlu diluruskan dengan melakukan pemisahan benang tersebut satu per satu, yakni menempatkan tiap persoalan secara *clear and distinct*

Saat ini, politik telah mengalami degradasi makna, konsep zoon politikon telah dimaknai dalam alur yang salah sehingga politik pun dimengerti sebagai sesuatu yang kotor. Konsep zoon politikon sebenarnya memiliki makna bahwa manusia sebagai binatang (makhluk) yang berpolitik, disini manusia bukan binatang melainkan makhluk yang memiliki instrumen dalam menciptakan politik dan menggunakan politik untuk mengatur hidupnya dalam bersosial dan bernegara. Bahkan fakta di Indonesia menunjukkan bahwa politik dimengerti dan identik dengan perebutan kursi legislatif DPR, kampanye partai dengan membagikan uang, saling silat lidah antara partai merah dan biru, mencurangi DPT agar menang dalam perebutan kursi, dan lain-lain. Contoh tersebut menunjukkan tingkat ironisasi bahwa pengetahuan dan pendidikan politik di Indonesia sangat rendah. Makna politik yang sesungguhnya telah tertutupi oleh praktek-praktek kotor politik, jadi yang dikenal oleh masyarakat bukanlah politik “yang-sesungguhnya” melainkan hanya “permainan atas nama politik”.

Politik yang sebenarnya justru berada dalam diam, dia justru yang sangat diharapkan untuk menyelesaikan kekacauan sistem yang terjadi namun dia tidak teraktualkan. Terkadang ada pihak-pihak yang mengaku paham akan politik dan telah berpolitik namun sebenarnya yang dilakukan sama sekali bukan politik. Bahkan meskipun adanya pengakuan politik dalam sebuah sistem yang otoriter dan menekan maka sesungguhnya disitu tidak pernah ada politik. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan akan politik itu sendiri, sehingga melupakan makna penting dan awal dari politik.

Politik memerlukan instrumen-instrumen agar dapat berjalan dengan lurus, instrumen tersebut diantaranya: kebebasan, komunikasi, tindakan, subjek politik. Kesemua instrumen tersebut merujuk pada dimensi ruang publik, di ruang publik itulah instrumen-instrumen tersebut bisa bekerja. Agar dapat menjadi subjek politik diperlukan kebebasan, komunikasi serta tindakan yang dilakukan. Kebebasan merupakan syarat utama politik, seseorang dapat masuk dan bergerak dalam politik jika dan hanya jika memiliki kebebasan. Mengutip Hannah Arendt, baginya kebebasan merupakan sesuatu yang fundamental dalam politik bahkan sebagai sebuah *conditio sine qua non* bagi politik, tanpa kebebasan tidak mungkin ada politik dan politik tanpa kebebasan sama sekali bukan politik, sementara

manusia tanpa politik sama sekali bukanlah manusia lagi.²⁶ Akan tetapi, kebebasan ini hanya bisa eksis pada ruang politik yang tidak lain adalah ruang publik.

Ruang publik juga tidak kalah memiliki peranan penting dalam mematok ruang politik, ruang publik merupakan ruang antara, yang mempertautkan berbagai kepentingan manusia-manusia yang duduk mengitarinya.²⁷ Instrumen lain yang sangat penting dalam menghaluskan tatanan politik yakni tindakan dan ucapan. Kembali merujuk pada Arendt, baginya dari semua aktivitas manusia yang mengkonstitusi *bios politikos* (kehidupan politik) adalah tindakan (*praxis*) dan ucapan (*speech, lexis*).²⁸ Hal ini turut mengantarkan adanya cara berada manusia dalam politik yakni komunikasi, dalam komunikasi terjadi persilangan timbal balik argumen antara manusia yang satu dengan yang lain. Masyarakat menuangkan segala kepentingan yang beragam melalui argumentasi, argumentasi turut pula merujuk pada kesetaraan manusia. Dengan adanya proses argumentasi, tindakan, ruang publik serta kebebasan ini maka konsep kewarganegaraan pun beralih menjadi warga negara yang berada dalam area publik, sebagai warga ruang publik maka manusia sebagai subjek politik diakui dan diukur atas dasar tindakan dan ucapan yang dilakukannya.

Prasyarat politik ideal telah membawa politik untuk dikembalikan pada esensi asalnya. Politik bukanlah sesuatu yang kotor, licik atau kejam seperti yang selama ini diidentikkan oleh orang-orang, namun politik memiliki telos untuk menciptakan keteraturan, keadilan dan melakukan pengaturan sistem sedemikian rupa sehingga rasa keadilan itu dapat tercipta. Selama ini yang terjadi adalah adanya jarak terhadap politik itu sendiri, jarak ini yang perlu dihapus sehingga bisa masuk ke dalam esensi politik yang sebenarnya. Politik yang berjarak akan membuat setiap subjek merasa jauh, tidak mengenalnya dan akan menganggap bahwa politik itu selalu berada “disana”. Padahal yang seharusnya terjadi adalah politik itu bisa membaur dengan setiap subjek (tanpa terkecuali) dan dapat merangsang setiap subjek itu untuk mengeluarkan tindakan maupun argumentasi

²⁶ Bagus Takwin, Daniel Hutagalung, Eddie Sius Suryadi, Robertus Robert dan Tonny Doludea, *Kembalinya Politik*, hal. 6.

²⁷ *Ibid.*, hal. 14.

²⁸ *Ibid.*, hal. 8.

politik. Sehingga, setiap subjek akan merasa menjadi bagian dari politik dan ikut dirangkul dalam tubuh politik. Mereka akan menganggap bahwa politik itu dekat, politik itu merupakan isu perputaran persoalan tiap kedirian mereka dan politik itu berada “disini” bersama dengan diri tiap subjek tersebut.

Melihat usaha pelurusan benang kusut politik tersebut sepertinya akan memunculkan pengandaian bahwa persoalan politik dengan demikian telah selesai. Pengandaian seperti itu merupakan pengandaian yang terlampau melompat jauh dan melupakan persoalan utama dalam skripsi ini, yakni identitas perempuan di dalam politik. Apa yang diwacanakan oleh Arendt merupakan sebuah upaya menciptakan politik yang ideal dengan menawarkan prasyarat tindakan, ruang publik dan kebebasan. Ketiga hal tersebut memang diakui cukup akurat dalam membangun subjek politik yang matang, namun di satu sisi telah melupakan posisi perempuan. Jika meletakkan perempuan dalam ketiga prasyarat politik tersebut maka perempuan jauh dari kata “memiliki” ketiga hal tersebut. Perempuan selalu terkekang dalam ruang privat dan dicekoki oleh berbagai tugas domestik yang membuat mereka sulit mencari celah masuk dalam ruang publik. Pintu gerbang perempuan untuk masuk ke dalam ruang publik sangat sulit untuk dibuka, dengan demikian berarti perempuan tidak mungkin bisa memiliki kebebasan dan melanggengkan dirinya untuk melakukan tindakan maupun melakukan komunikasi argumentasi. Perempuan berada dalam posisi yang diam dan terpinggirkan, hal ini yang perlu dirubah agar perempuan bisa menjadi subjek politik.

Ruang publik lah yang memungkinkan perempuan dapat memperoleh kebebasan politik serta dapat mengaktualkan tindakan serta argumentasinya. Ruang publik dapat mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk saling terhubung satu sama lain sebagai subjek politik yang saling berkomunikasi melakukan tindakan dan mengeluarkan argumentasi. Perempuan memerlukan kebebasan dalam ruang publik dan hal ini harusnya telah disadari oleh setiap subjek baik diri perempuan itu sendiri maupun diri laki-laki.

Tiga prasyarat politik ideal juga menunjukkan bahwa politik sebagai sarana maupun alat dalam menciptakan keadilan dalam kehidupan dapat terjadi jika tiga prasyarat politik tersebut telah dimiliki oleh setiap subjek baik laki-laki

maupun perempuan. Politik yang mengarah kepada keadilan dapat terjadi jika laki-laki dan perempuan telah memiliki kebersamaan dan kesamaan dalam ruang publik. Dengan demikian, perempuan juga harus diberikan akses untuk leluasa masuk dalam ruang publik serta diberi kebebasan politik sehingga perempuan dapat melakukan tindakan komunikasi maupun argumentasi politik dengan setiap individu yang berada di dalam ruang publik. Fisiologi tubuh perempuan tidak dapat dijadikan alasan terus-menerus untuk mengkekang perempuan pada ruang privat, bagi Arendt sendiri politik tidak dapat muncul pada ruang privat, dia tinggal dan hidup di dalam ruang publik.

4.3 KRITIK dan SECERCAH HARAPAN pada DEMOKRASI

Demokrasi serupa maskot dalam kompetisi sistem politik yang ada di dunia, dia diangungkan, diunggulkan dan begitu dipuja. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan betapa unggul dan tangguhnyanya demokrasi, namun bukan berarti demokrasi merupakan sistem yang tanpa cela, sistem politik yang sempurna adalah sistem yang tidak menjatuhkan finalitas dan ini pula yang harusnya dapat terjadi pada demokrasi. Akan tetapi, fakta aktual menunjukkan bahwa demokrasi menjadi sistem yang bolong dan cacat.

Terjadi degradasi antara demokrasi yang dikonsepsikan melalui teori dan penerapan praktis dari demokrasi itu sendiri. Secara kacamata teori, memang teori demokrasi memiliki keunggulan dan kemampuan dibandingkan dengan sistem lain, namun secara prakteknya demokrasi seperti berada dalam lingkaran setan yang hanya dapat berputar-putar dan tidak dapat mengatasi kerikil yang menghantam tubuh demokrasi. Demokrasi pun kembali mengalami degradasi arti, demokrasi bukan lagi pemerintahan atau kekuasaan oleh rakyat namun pemerintahan yang berdasarkan atas sistem suara terbanyak dan hal ini pula yang terjadi dalam demokrasi di Indonesia. Seharusnya roda kerja demokrasi dapat menampung serta menyertakan suara dari setiap individu dalam negara, namun demokrasi justru menjadi milik "yang mayoritas", sementara bagi yang minoritas mau tidak mau harus mengalah, menyingkir bahkan terbuang. Timbul *silent voice*

yang tidak dapat berbuat apa-apa dan selalu berdiam menerima sebuah sistem demokrasi yang jauh dari tujuan awal.

Demokrasi dalam dirinya telah menyimpan kepalsuan, menggunakan segala cara untuk mencapai target "demokratis". Seharusnya demokrasi tidak menjadi sistem yang tertutup dan tidak berjendela namun ia harus terbuka dan dapat mengkritik dirinya sendiri. Demokrasi juga turut dicampuradukkan serta dipertukarkan arti dengan konsep yang selama ini dikritik oleh demokrasi itu sendiri. Hal yang ditekankan oleh demokrasi seperti pluralitas serta penghargaan setiap pendapat menjadi hal yang semu karena demokrasi justru tertutup terhadap kritik kepada dirinya yang berasal dari perbedaan. Hal ini dapat ibaratkan dengan mencari untung dan pujian bagi dirinya sendiri, serta menolak kritikan dan kerugian yang menghampirinya.

Pada sisi lain, muncul kapitalisme sebagai pengganti sosialisme-komunisme, kapitalisme telah menguasai proyek global sama halnya seperti demokrasi. Kapitalisme kemudian berjalan bergandengan dengan demokrasi, mainstream pemikiran yang berkembang adalah antara kapitalisme atau demokrasi, tak jarang istilah yang dikemukakan demokrasi ternyata berbaju kapitalisme, misalnya: proyek pembangunan dijadikan topeng kapitalisme dengan baju demokrasi. Pembangunan dianggap solusi terbaik menuju tingkat kehidupan demokratis namun tidak jarang dengan pembangunan tersebut negara mengalami goncangan krisis keuangan baik dikarenakan hutang maupun KKN. Bagi kapitalisme sendiri, demokrasi harus tetap ditegakkan demi menjamin keberlangsungan investasi dan percepatan perubahan sosial, meski di dalamnya terus-menerus diciptakan mimpi tentang keseimbangan serta manipulasi yang mengecewakan.

Teori demokrasi dalam pengertian formal dan struktural menjadi barang yang berbeda dengan praktik demokrasi nyata di tengah masyarakat, tidak jarang bajunya demokrasi tetapi perilakunya liberalis. Ada asumsi bahwa demokrasi memiliki muatan lokal, demokrasi dapat sempurna pelaksanaannya dengan muatan lokal dimana demokrasi hidup, alasan itu pula yang menimbulkan beberapa istilah yang melekat pada tubuh demokrasi seperti: Demokrasi Diktator, Demokrasi Radikal, Demokrasi Lokal, Demokrasi Sosialis, Demokrasi Pancasila dan lain-

lain. Demokrasi perlu dikembalikan pada nilai asli dimana ia hidup, dengan kata lain negara tidak bisa memaksakan kehendaknya atas demokrasi. Setiap negara dapat mencari identitas demokrasiya sendiri. Di Indonesia sendiri pengklaiman demokrasi telah memunculkan perbedaan pendapat yang tajam saling mau menang sendiri, melenyapkan satu sama lain dan tak ada toleransi.

Keadaan *chaos* dalam demokrasi menjadi sebuah rahasia umum yang selalu diperlihatkan, meski demikian demokrasi secara teori tidak menginginkan adanya kekacauan sistem. Suka tidak suka, demokrasi tetap menjadi pintu keluar atas pencarian sistem politik yang unggul, meski dalam dirinya demokrasi memiliki banyak cela bukan berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi itu. Persoalan yang dihadapi adalah kesalahan dalam penerapan arti demokrasi dan hal itu yang perlu dirubah, sehingga demokrasi masih memungkinkan untuk digunakan. Diperlukan sebuah dekonstruksi terhadap sistem pelaksanaan dari demokrasi, selama ini banyak individu melaksanakan serta menyuarakan demokrasi namun mereka tidak mengerti sama sekali makna dari demokrasi itu sendiri.

Basis dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, tempat rakyat dalam kedaulatan rakyat itu tidak bernama dan senantiasa kosong. Pemikir politik kontemporer Claude Lefort melihat kekosongan keadulatan itulah yang merupakan karakter pokok demokrasi, demokrasi harus selalu merupakan ruang kosong. Lefort sendiri memandang politik sebagai "ruang kosong" (*the locus of power is an empty place*).²⁹ Dengan demikian, politik merupakan sebuah ruang yang tidak dapat dihuni oleh finalitas, namun harus selalu dipertanyakan serta diverifikasi. Hal ini juga merupakan cerminan dari demokrasi, demokrasi merupakan ruang kosong dimana ruang ini merupakan milik rakyat, namun rakyat tidak menempati ruang tersebut dan membolehkan wakil-wakil rakyat untuk mendiami ruang tersebut hanya untuk sementara, tidak selama-selamanya. Ruang ini harus selalu kosong dan tidak boleh dimiliki oleh satu pihak secara penuh, pihak yang menempati ruang tersebut harus berganti-ganti dalam jangka waktu sementara sesuai dengan masa kontrak yang mereka miliki.

²⁹ Claude Lefort, *Democracy and Political Theor*, hal. 17.

Demokrasi masih memiliki harapan untuk digunakan selama sistem yang bekerja dalam demokrasi itu merupakan sistem yang benar-benar mencerminkan arti demokrasi. Demokrasi sesungguhnya dapat menampung setiap suara warga negaranya dan lebih menekankan kepada suara rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara dipandang sama tanpa membedakan ras, etnis, agama maupun jenis kelamin dan hal inilah yang memberikan titik terang kepada perempuan untuk turut serta tanpa harus dibedakan dan dipinggirkan.

Beberapa filsuf dan feminis politik masih menggantungkan harapannya pada sistem demokrasi, seperti Derrida maupun Mouffe. Derrida meletakkan cita-cita demokrasi di luar kosmopolitanisme atau kewarganegaraan dunia, melampaui kekuasaan tertinggi politik, ekonomi dan hukum. Derrida mengajukan suatu demokrasi radikal, yaitu demokrasi mendatang: sebuah demokrasi yang belum eksis saat ini dan tidak dapat dipresentasikan. Namun, demokrasi ini menyambut baik kemungkinan untuk digugat, untuk menggugat diri sendiri, mengkritik dan melakukan refleksi untuk terus-menerus memperbaiki diri.

Derrida telah meretas jalan dengan mengevaluasi secara menyeluruh prinsip-prinsip yang mendasari pencerahan barat. Derrida secara radikal mendesak pencerahan menuju perbatasannya, suatu keterarahan kepada masa depan melalui manifestasinya yang terkini. Pencerahan itu ada di masa depan, tetapi tidak dapat diprediksi dan diidentifikasi, ia merupakan proses yang tak pernah berkesudahan. Derrida juga memberi penjelasan mengenai batas antara yang "privat" dan yang "publik". Bagi dia, yang hendak ia kemukakan bukanlah sesuatu yang menghindari arena publik, yang dikemukakannya adalah "yang-rahasia", "yang-rahasia" disini adalah orang-orang yang berdiam, terlupakan dan terpinggirkan, seperti: perempuan.

Baginya, "yang-rahasia" ada di sebuah zona yang tak dapat disentuh yang berkuasa bahkan dalam sistem totaliter sekalipun. Akan tetapi, dengan mengakui "yang-rahasia", dan menghargainya, akan terbukalah wilayah publik itu bagi "yang-lain". Di sini Derrida turut memasukkan persoalan tentang demokrasi, bagi Derrida demokrasi akan mati bila "yang-rahasia" diletakkan semata-mata sebagai persoalan privat. Demokrasi merupakan sebuah usaha dari "yang-rahasia" untuk membebaskan diri dari sebuah bangunan politik yang mau merengkuhnya. Dalam

demokrasi itu pula terdapat *hospitality* yang menyambut perbedaan, merangkul yang dilukai, dihina, tak berdaya dan ditinggalkan. *Hospitality* membuka ruang bagi yang terkalah dan terbuang, mungkin agak mustahil hal seperti itu akan mengubah dunia tapi disini Derrida tidak berbicara mengenai sebuah hal yang utopia, melainkan "ke-messiah-an", sebuah janji di hari ini, hari yang selalu tak lengkap, bahwa *la démocratie à venir*, demokrasi selalu "akan datang". Begitu pula yang dilakukan oleh Chantal Mouffe dengan menawarkan sebuah konsep demokrasi plural radikal seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Konsep demokrasi Lefort, Mouffe maupun Derrida telah memberikan sebuah harapan baru pada gejala skeptisme terhadap demokrasi, demokrasi masih memiliki ruang untuk menjadi dirinya sendiri dan mampu menampung kedaulatan rakyat dengan transparan dan adil.

4.4 KETERWAKILAN PEREMPUAN dalam POLIITK DEMOKRASI

Meski skeptisme terhadap pelaksanaan demokrasi dapat teratasi, masih ada satu persoalan penting dalam demokrasi yakni kemungkinannya untuk memberikan ruang bagi perempuan sehingga dapat turut serta dalam politik demokrasi. Apakah demokrasi telah menyertakan setiap warga negaranya secara adil (termasuk posisi perempuan dan laki-laki)? Apakah perempuan menyadari posisinya dalam sebuah sistem demokrasi atau hanya bersikap *taken for granted* dalam menerima sistem tersebut? Sejauh mana peran perempuan dalam sistem demokrasi? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah tantangan baru bagi tubuh demokrasi. Demokrasi yang mengusung nama kedaulatan rakyat seharusnya di dalam dirinya turut menyertakan kedaulatan perempuan dan laki-laki dengan adil. Pertanyaan tersebut dapat ditelusuri dengan ringkas dengan melihat peran keterwakilan perempuan dalam demokrasi, hal ini menjadi sangat penting karena keterwakilan perempuan menunjukkan kebebasan politik yang merupakan prasyarat dasar sebagai subjek politik, kebebasan politik menunjukkan ekspresi eksistensial dari perempuan. Ini merupakan sebuah penelusuran atas level

kebebasan politik perempuan serta kecakapan tindakan maupun argumentasi yang mampu diberikan oleh perempuan.

Kalangan feminis yakin bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkis. Selain itu, dengan berada dalam ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan yang merupakan sebuah "ruang hunian kosong" demokrasi merupakan cara agar kepentingan perempuan terwakili. Masuknya perempuan dalam perumusan pengambilan keputusan serta kebijakan akan menciptakan dunia baru, dunia yang bebas diskriminasi dan perspektif gender akan mampu masuk ke dalam kebijakan tersebut.

Di Indonesia sendiri, sedang terjadi perdebatan yang alot mengenai jumlah representasi perempuan dalam sistem politik demokrasi. Representasi perempuan dalam politik melalui para politikus perempuan jelas suatu kemajuan peradaban, namun perlu diingat bahwa representasi politik tidak harus diafirmasi melalui jumlah wakil dalam lembaga politik. Salah satu fungsi partai politik dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik adalah "rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender." Tetapi, langkah untuk 'memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender' yang diamanatkan oleh pasal di atas justru telah salah dimaknai oleh para penyusun undang-undang. Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menyebut "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."

Ada asumsi bahwa logika keterwakilan tidak harus dibangun berdasarkan jumlah wakil dalam lembaga politik. Bisa saja perempuan yang duduk dalam parlemen justru mengusung isu yang kemungkinan merendahkan martabat perempuan (hanya karena dia memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau keuntungan-keuntungan sepihak lainnya dari isu yang diusung)? Apakah perempuan yang demikian lebih layak dipertimbangkan untuk dijadikan wakil rakyat ketimbang laki-laki yang mengusung isu pemberdayaan perempuan –

hanya atas nama jumlah representasi perempuan? Asumsi seperti ini banyak muncul sebagai suatu sikap yang skeptis terhadap potensi perempuan dalam berpolitik, kemungkinan seperti itu dapat saja terjadi namun bukan dikarenakan faktor dari diri perempuan itu sendiri melainkan dikarenakan faktor luar yang mempengaruhi diri perempuan tersebut, seperti faktor partai politik. Terkadang perempuan hanya digunakan sebagai alat oleh partai politik demi alasan semu, perempuan disini kembali menjadi alat politik dan menjadi kaum mayoritas yang inferior serta terbungkam.

Banyak juga pihak yang menolak *affirmative action* dengan alasan mereka bisa berkompetisi secara *fair*. Kuota 30% bukanlah tujuan akhir melainkan sarana atau alat untuk mencapai *goal* yang lebih besar yakni masyarakat yang demokratis. Negara demokratis merupakan negara yang dapat menyelenggarakan *affirmative* dengan baik, salah satu contoh negara demokratis yang dapat dilihat adalah Swedia. Swedia merupakan negara yang sangat sukses dalam menerapkan *affirmative action*, berdasarkan data diketahui bahwa pada tahun 2002 jumlah perempuan di parlemen Swedia berjumlah 43 orang, sementara jumlah laki-lakinya adalah 57 orang. Swedia menerapkan sistem proposional dan tidak lagi mempermasalahkan perbedaan kelamin dalam pemerintahan bahkan parlemen Swedia pun dipimpin oleh seorang perempuan.

Dalam pemerintahan Swedia, hampir 50% Menteri nya adalah seorang perempuan, keikutsertaan perempuan dalam politik telah memberikan efek terhadap bentuk sistem kesejahteraan di Swedia. Tidak mengherankan banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swedia yang sangat ramah perempuan, seperti: seorang ibu yang tidak bekerja berhak atas tunjangan melahirkan dari negara selama 390 hari ditambah 90 hari, larangan “membeli seks” oleh para laki-laki di rumah bordil, panti pijat dan lain-lain. Jaminan dan fasilitas yang diberikan negara terhadap perempuan Swedia, membuat para perempuan tersebut menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada laki-laki. Kebijakan ramah perempuan yang dihasilkan parlemen Swedia tersebut tidak terlepas dari banyaknya keterlibatan perempuan di dalam parlemen Swedia sendiri. Bagi perempuan Swedia, menduduki kursi parlemen adalah keputusan dan alat strategis untuk mengubah nasib perempuan, siapa lagi yang akan

memperjuangkan nasib perempuan jika bukan perempuan itu sendiri karena perempuanlah yang sesungguhnya mengerti apa yang dibutuhkan oleh mereka.

Kesuksesan yang dialami oleh perempuan Swedia memakan waktu serta perjuangan yang panjang. Saat awal perempuan Swedia masuk politik, mereka dilecehkan oleh laki-laki bahkan bersedia mengorbankan waktunya untuk mengikuti rapat bersama laki-laki hingga pukul 12 malam, memang selalu ada yang perlu dikorbankan guna mencapai perubahan. Lalu bagaimana dengan perempuan Indonesia? Sejarah politik perempuan di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak pasca kemerdekaan karena pada saat itu perempuan Indonesia telah mencapai tingkatan-tingkatan politik yang jauh lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Sejak tahun 1945 hak perempuan untuk memilih telah diakui, bahkan sejak masa revolusi dua orang perempuan telah dipilih sebagai Menteri.

Akan tetapi, yang terjadi setelah itu justru sebuah kemandekan posisi perempuan dalam politik (khususnya pada tahun 1965-an di zaman Soeharto, dimana perempuan terpinggirkan ketika Dharma Wanita diciptakan), pada akhirnya politik kembali didominasi oleh laki-laki dan perempuan terpinggirkan. Perubahan status perempuan dalam politik tersebut dikarenakan proses dari demokrasi di Indonesia sendiri yang belum matang dan tidak berjalan melalui tahapan-tahapan, melainkan melalui lompatan-lompatan jauh. Lompatan ini akan mempengaruhi politik serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tentunya setiap lompatan “demokrasi” bergerak menuju telos yang berbeda-beda, ada yang sangat peka terhadap isu perempuan namun ada pula lompatan yang pada akhirnya meminggirkan perempuan. Demokrasi di Indonesia masih kurang dalam upaya merangkul sebuah masyarakat demokratis, bagaimana bisa menjadi masyarakat demokratis jika yang dilakukan dalam prakteknya jauh dari kata demokratis.

Saat ini, pesta demokrasi lima tahunan yakni PEMILU kembali terjadi, telah bergulir pertarungan kursi antara laki-laki dan perempuan dengan sengit melalui presentase angka-angka hasil pilihan masyarakat. Meski perempuan telah berani untuk menceburkan diri dalam pergulatan rebut kursi tidak menjadi jaminan penyelesaian final persoalan perempuan dalam politik. Identitas perempuan disini belum menjadi *political being* namun hanya menjadi bayang laki-laki, artinya perempuan seolah-olah menjadi pengikut apa yang telah

dilakukan oleh laki-laki namun belum memiliki kesadaran bahwa mereka juga menjadi bagian sekaligus harus bertindak sebagai makhluk politik. Pilihan perempuan dalam arah alur politik telah dibayangi oleh pilihan yang berasal dari faktor luar, dalam kondisi ini yang sangat dibutuhkan oleh perempuan adalah proses pendidikan politik sehingga mereka bisa menemukan jati diri mereka sebagai makhluk politik.

Meskipun demikian, majunya perempuan dalam keterwakilan politik merupakan sebuah awal kemajuan dan tentunya memerlukan sebuah perjuangan untuk meraihnya secara utuh. Hal ini sekaligus sebagai langkah awal bagi perempuan untuk menemukan identitas mereka dan mendaulatkan diri mereka sebagai subjek politik. *Affirmative action* memiliki potensi stimulus untuk merangsang perempuan masuk ke dalam wahana politik, sebuah wahana yang masih asing bagi mereka. Dengan demikian, politik tidak lagi menjadi dunia yang asing bagi perempuan dan politik sendiri pun tidak lagi asing terhadap keberadaan perempuan di dalamnya. Memasuki wilayah strategis politik bagi perempuan berarti dapat membuat kebijakan-kebijakan yang ramah dengan perempuan. Jika menginginkan keadilan pengaturan sumber daya bagi laki-laki dan perempuan secara adil, satu-satunya cara adalah perempuan terlibat secara langsung dalam setiap tahapan pengaturan tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan akan muncul dari suara-suara perempuan yang masuk dalam lembaga legislatif pembuat kebijakan. Ada asumsi bahwa tidak selamanya hanya perempuan saja yang dapat membawa isu-isu perempuan dalam politik, namun perlu diingat perempuan lebih memiliki *power* untuk mengartikulasikan persoalan yang dialami oleh perempuan karena mereka dapat memahami perasaan serta kebutuhan sesama perempuan, dengan kata lain perempuan lah yang lebih mengenal apa yang benar-benar dibutuhkan oleh kaumnya. Laki-laki mungkin dapat berbicara “seperti perempuan” namun perempuan jauh memiliki potensi untuk berbicara “sebagai perempuan”. Berbicara “sebagai perempuan” tentu dapat mengarahkan diri perempuan pada pencapaian subjek, ini merupakan sebuah pijakan awal.

Jika perempuan telah bisa berperan sebagai subjek bagi dirinya dan bagi subjek lain maka akan memudahkan perempuan untuk menuju tahap berikutnya,

yakni sebagai subjek politik. Dengan menjadi subjek berarti perempuan telah menjadi individu yang independen, memiliki kesadaran akan dirinya dan pilihan yang dilakukannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingan mereka. Perempuan mampu meraih eksistensinya dengan pencapaian yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Perempuan harus memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda perempuan dalam politik. Konstruksi sosial harus menempatkan perempuan pada posisi subjek yang cukup-diri dan berkekuasaan untuk mengusung kepentingan mereka dan merealisasikan gagasan mereka bersama dengan kelompok lain dalam masyarakat.

4.5 TITIK TERANG SISTEM POLITIK BARU

Politik merupakan ruang bebas yang melepas ikatan para penghuninya dari rezim maupun totalitarianisme. Pada hakikatnya persoalan politik terletak pada cara pengelolaan, yakni bagaimana setiap individu yang berada di dalamnya mampu mengelola kebersamaan sehingga masing-masing individu terwakili dan terlibat dalam pengelolaan tersebut dengan adil. Dengan demikian, persoalan politik adalah persoalan keadilan, pencapaian keadilan dalam kehidupan bersama tanpa ada perbedaan. Keadilan disini tentunya juga berlaku untuk perempuan dan laki-laki, politik harus mampu merangkul perempuan dan laki-laki dengan melibatkan mereka secara adil dalam arena politik. Meski demikian, hal tersebut menjadi sebuah teori semata karena secara faktual politik yang ada jauh dari telos keadilan dan perempuan masih terpinggirkan dalam politik, perempuan masih berusaha melakukan pencapaian untuk meraih predikat sebagai subjek politik.

Solusi untuk membereskan persoalan tersebut tentulah bukan sesuatu yang enteng, diperlukan dekonstruksi total yakni pembongkaran serta perubahan keseluruhan tatanan, suatu perjuangan menuju perubahan. Upaya yang dilakukan disini adalah menciptakan perubahan melalui perubahan sistem politik, diperlukan suatu sistem politik baru yang dapat bergerak dengan adil tanpa mempersoalkan kembali perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sistem politik yang dirumuskan disini terarah bukan kepada prasyarat politik maupun metapolitik, melainkan sebuah usaha untuk menciptakan sistem dimana

didalamnya politik dapat mencapai telos keadilan dengan sendirinya, artinya sistem ini akan bekerja dengan sendirinya untuk memproduksi keadilan. Sistem ini lebih keras serta efisien, Arendt memang telah menyediakan perkakas sebagai prasyarat dalam politik yakni kebebasan, tindakan, ucapan serta terbukanya ruang publik, Lefort juga telah membongkar esensi politik dan demokrasi, dan masih banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh pemikir politik kontemporer, namun itu saja masih belum cukup karena yang diperlukan adalah dekonstruksi total terhadap infrastruktur dari berdirinya politik dan itu adalah sistem yang bekerja di dalamnya.

Persoalan pertama yang muncul disini adalah kedudukan sistem politik baru ini dalam demokrasi. Demokrasi seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya memiliki harapan untuk mencapai keadilan selama prosedur yang bekerja di dalamnya tepat sasaran. Lefort katakan bahwa demokrasi harus selalu berada sebagai ruang kosong, hal ini dapat menghindari demokrasi dari totalitarianisme namun belum dapat menghindari diskriminasi gender dalam demokrasi itu sendiri. Dalam memandang sejauh mana kebutuhan perempuan akan demokrasi, sudut pandang yang digunakan kembali merujuk kepada teori feminis politik Anne Philips dan Chantal Mouffe. Analisa penggabungan teori Philips dan Mouffe akan menjawab pertanyaan apakah perempuan masih membutuhkan demokrasi untuk mencapai telos keadilan dalam politik? Pendekatan feminis politik menjadi hal yang utama dan sangat penting karena kemampuannya untuk menghasilkan sebuah sitem politik yang adil, tidak hanya bagi perempuan namun bagi setiap warga negara. Penggabungan teori Philips dan Mouffe dapat lebih jelas terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penggabungan Teori Philips dan Mouffe

SUDUT PANDANG PHILIPS	SUDUT PANDANG MOUFFE
------------------------------	-----------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Pijakan awal Philips adalah dengan melakukan kritik terhadap institusi demokrasi: demokrasi menurutnya sebagai sebuah sistem yang menghubungkan dua hal yakni, yang direpresentasikan dan yang merepresentasi. Konsekuensi dari demokrasi adalah apa yang akan diwakili kemudian mengambil prioritas melebihi siapa yang diwakili. Kualitas dari demokrasi dijamin dengan luasnya hak pilih terhadap semua orang dewasa, setiap laki-laki maupun perempuan yang berkontribusi suaranya pada <i>opinion</i> yang menguntungkan untuk publik. Yang biasa terjadi dari banyak otoritas pra-demokrasi adalah peranan politikus untuk membawa pesan. Pesan ini akan bertukar-tukar, tetapi hal ini akan terasa berat dan susah jika pembawa pesannya sama, yakni laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai pembawa pesan, pembawa amanat atas suara-suara yang ingin diwakili dalam pemerintahan, bahkan laki-laki dipercaya memiliki kemampuan politik dalam mengartikulasikan kebijakan dan ide ketimbang perempuan. Padahal menurutnya hanya perempuan yang mampu menyuarakan apa yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mouffe dengan kencang berusaha mengkritik demokrasi liberal, baginya demokrasi liberal tidak mampu untuk memahami persoalan yang terjadi pada saat ini dimana dunia saat ini telah dibinasakan oleh etnis, agama dan konflik nasional. • Mouffe mengungkapkan sebuah konsep gerakan kemasyarakatan baru "<i>new movement</i>", yakni gerakan yang merangkum berbagai gerakan atau perjuangan yang tidak berbasis kelas dan bukan gerakan buruh, seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi, gerakan feminis, gerakan anti-rasisme, gerakan etnis, gerakan regional, dan gerakan perdamaian. Gagasan ini terkait dengan ide Mouffe mengenai demokrasi yang lebih radikal dan mengakui pluralitas gerakan. • Suatu pengertian demokrasi yang baru juga mensyaratkan bahwa kita melampaui berbagai pengertian hak yang bersifat pribadi dan mengembangkan pengertian solidaritas yang mengikat semua. Ini hanya dapat dicapai apabila hak-hak subjek-subjek tertentu tidak dipertahankan mati-matian dengan
---	---

<p>oleh perempuan "<i>a man, no matter how honest he may be, cannot represent a woman</i>".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Philips kemudian mempertimbangkan untuk menerima demokrasi kontemporer yang dapat menunjuk persoalan representasi dalam masyarakat heterogen. • Philips membawa isu-isu penting dalam feminis politik, yang pertama adalah pemisahan antara ruang publik dan privat, yang kedua adalah kesalahan definisi politik seperti yang telah terjadi di dalam lapisan masyarakat. 	<p>merugikan hak-hak subjek-subjek yang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi radikal dan plural digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam mendirikan rantai kesamaan diantara perbedaan perjuangan demokrasi sehingga nanti akan menciptakan artikulasi yang ekuivalen antara perempuan, kulit hitam, gay dan lainnnya. • Mouffe juga mencetuskan sebuah ide pencerahan, bahwa perbedaan seksual tidak seharusnya dijadikan perbedaan yang valid. Yang dibutuhkan dalam demokrasi radikal dan plural bukanlah model perbedaan seksual yang mana tugas spesifik baik laki-laki maupun perempuan akan dinilai sama, namun lebih kepada konsep perbedaan dari <i>what is to be citizen</i> dan <i>to act as a member of a democratic political community</i>.
--	---

Dari tabel di atas secara tersirat dapat dilihat bahwa kedua tokoh feminis politik tersebut tetap berujung pada demokrasi namun perbedaannya terletak pada jenis demokrasi yang diyakini dan diusung oleh keduanya. Mouffe secara keras berpegang teguh pada keyakinannya akan demokrasi plural radikal dimana mampu menampung *new movement* termasuk feminisme. Sementara Philips sedikit melirik pada demokrasi kontemporer yang dianggap memiliki potensi dalam merangkul masyarakat heterogen. Sebagai tambahan, gagasan yang sangat menarik dalam Mouffe adalah penolakannya terhadap *sexual difference*,

sementara Philips mengusung sebuah pola yang lebih umum, yakni *politics of difference*. Politik pada dasarnya memang selalu berkuat dengan *difference* namun label yang ditempelkan pada *difference* tersebut selalu berbeda.

Hal tersebut sama dengan yang terjadi pada demokrasi, label yang ditempelkan pada demokrasi berbeda-beda dimulai dari demokrasi liberal, demokrasi modern, demokrasi plural radikal dan lain-lain. Penggunaan label demokrasi tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing politik dan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Label Demokrasi dapat dianalogikan seperti iklim cuaca yang berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kondisi geografis negara tersebut. Mouffe dan Philips masih memiliki keyakinan bahwa perempuan masih membutuhkan demokrasi untuk mencapai telos keadilan dalam politik. Demokrasi masih memiliki kemampuan untuk merangkul perempuan dan tidak lagi menggunakan *sexual difference* sebagai patokan gerak perempuan dalam ruang publik. Demokrasi harus selalu terbuka dan kosong, terbuka disini memiliki cakupan yang luas dalam arti demokrasi dapat menerima setiap kritik maupun verifikasi, demokrasi juga dapat menerima setiap individu (siapaapun itu tanpa terkecuali), demokrasi bahkan mampu mempertanyakan dirinya agar dapat terhindar dari finalitas, demokrasi harus selalu terbuka dan kosong, *open and empty democracy*.

Open and empty democracy akan dapat berjalan beriringan dengan gagasan sistem politik baru yang diusung di sini. Sistem politik baru ini akan menjadi sebuah alat yang bekerja dengan sistematis, dia bekerja dengan sendirinya untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhannya. Dalam politik demokrasi, kewarganegaraan merupakan hal yang vital oleh karena itu sistem politik baru ini turut mengatur status kewarganegaraan setiap individu dengan adil dan sama, sistem politik ini bernama politik cermin biseksual, *mirror bisexual politics*. Cermin biseksual merupakan alat yang secara kasar dapat menimbulkan ekuivokasi karena term cermin dan biseksual disini tidak diartikan secara denotasi melainkan *beyond* dari cermin dan biseksual itu sendiri. Cermin disini tidak dimaksudkan dengan cermin sebenarnya (cermin sebagai benda), cermin ini tidak hadir secara nyata "*an invisible mirror*", tidak terlihat secara kasat mata namun dia ada, transparan serta berada di depan diri kita. Cermin ini memiliki fungsi

yang sama dengan cermin faktual, yakni untuk "berkaca" pada diri kita dan juga memiliki pantulan refleksi. Namun perbedaannya adalah pada cermin ini pantulan yang dihasilkan bukanlah bayangan diri kita secara faktual yang terdiri dari mata kita, hidung kita serta anggota tubuh kita, melainkan yang dihasilkan adalah kedirian kita serta kedirian subjek lain. Dalam cermin itu kita tidak hanya melihat refleksi diri kita namun juga refleksi diri orang lain.

Sementara term biseksual disini juga sama dengan cermin, biseksual disini tidak dimaksudkan untuk merujuk pada jenis kelamin karena telos keadilan dalam politik dapat tercapai bila tidak menggunakan jenis kelamin sebagai perbedaan. Saat ini sudah tidak relevan jika memasukkan perbedaan jenis kelamin dalam setiap relasi sosial publik karena itu biseksual disini bergerak *beyond of gender*. Biseksual disini merupakan kata sebagai pengganti keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan politik. Politik biseksual mengakomodasi dengan lebih detil baik laki-laki maupun perempuan dengan adil. Selama ini politik selalu diidentikkan dengan dunia laki-laki, milik laki-laki, oleh karena itu kata biseksual disini akan lebih memudahkan dan memberi rasa aman kepada setiap individu karena dalam term biseksual tersebut mereka semua terwakili tanpa pandang bulu.

Politik cermin biseksual ini dapat menyelesaikan persoalan relasi perempuan dan laki-laki dalam politik. Ketika perempuan melihat dirinya dalam cermin, dia tidak hanya mendapatkan pantulan refleksi dirinya namun juga dapat melihat pantulan refleksi diri yang lain, seperti: laki-laki. Pantulan yang direfleksikan oleh cermin membuat perempuan dapat melihat dirinya dalam dua dimensi, yakni dirinya dan laki-laki, begitu pula yang terjadi dalam diri laki-laki. Di dalam cermin itu, kita bisa menjadi "yang lain", kita dapat melihat sosok yang lain, kita dapat membawa sosok itu ke dalam perspektif kita. Meskipun begitu, kita tidak akan pernah menjadi sosok itu dan sosok itu juga tidak akan pernah menjadi diri kita.

Pantulan sosok itu tidak akan menghilangkan esensi diri kita maupun dirinya, pantulan kita dan dirinya memang bukan suatu kesatuan secara faktual namun "dua" pantulan ini akan menjadi "satu", satu rasa, satu emosi. Ketika kita telah menerima pantulan cermin sosoknya, kita akan menciptakan ide kebutuhan yang sama akan dirinya dan diri kita lalu kita merekam "kesegalaan" sosoknya

dalam memori kita, hal ini akan membantu sosoknya dalam proses "becoming" bagi sosok tersebut dan ketika kita telah keluar dari cermin itu, dimana kita sedang menjadi diri kita, kita tetap mengingatnya. Keberadaan sosok itu terlihat dan tidak terlihat, dalam pantulan sosoknya *the invisible* nampak dan hadir. Pantulan kita adalah sama dengan pantulan dirinya, sekaligus berbeda dengan dirinya, aku adalah kamu dan sekaligus aku bukan kamu.

Sosok yang hadir dalam pantulan *the invisible mirror* bisa perempuan ataupun laki-laki tergantung pada siapa yang sedang bercermin. Pantulan diri kita akan diikuti oleh pantulan sosok lain, refleksi pantulan diri perempuan akan diikuti oleh pantulan refleksi diri laki-laki begitu pula dengan laki-laki, ketika laki-laki bercermin maka pantulan yang muncul bukan hanya refleksi dirinya namun juga refleksi diri perempuan. Hal ini akan membuat laki-laki lebih mengenal kebutuhan diri perempuan karena ide kebutuhan perempuan sama dengan ide kebutuhannya, sebagai contoh laki-laki menginginkan kursi pada PEMILU, maka ketika laki-laki bercermin dia akan melihat sosok perempuan juga hadir dalam pantulan dengan membawa ide kebutuhan kursi pada PEMILU juga. Laki-laki dengan demikian dapat mengetahui kebutuhan perempuan dan hal tersebut akan direkam olehnya dan ini akan membantu perempuan dalam proses *becoming* dalam politik. Ketika laki-laki telah keluar dari cermin tersebut, dimana dia telah menjadi dirinya kembali, laki-laki akan tetap mengingat ide kebutuhan dari perempuan. Antara diri laki-laki dan sosok pantulan refleksi perempuan dalam cerminnya dihubungkan oleh suatu jembatan.

Hal ini pada akhirnya akan membuat laki-laki ketika bercermin akan dirinya selalu menemukan pantulan sosok perempuan di dalamnya dan akan direkam dalam memorinya. Dengan demikian, hal ini akan mempermudah dalam pertukaran ide kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, mempermudah perempuan untuk memperoleh porsi politik yang sama dengan laki-laki, serta laki-laki memandang perempuan sama sebagai subjek politik seperti diri mereka. Pengakuan perempuan sebagai subjek politik sekaligus mendaulatkan mereka sebagai *political being*, dengan demikian langkah perempuan untuk masuk dalam kancah demokrasi menjadi terbuka lebar karena tidak ada lagi perbedaan seksual dan laki-laki telah menyadari bahwa perempuan sama halnya seperti mereka.

Perempuan memiliki kemampuan komunikasi dan argumentasi yang sama kuatnya dengan laki-laki hanya saja perempuan kurang memiliki kebebasan dan akses untuk masuk dalam ruang publik.

Open and empty democracy berjalan dimana setiap individu di dalamnya telah menerapkan politik cermin biseksual sehingga perempuan dapat masuk ke dalam akses public serta meluaskan kebebasan politik yang dimilikinya, dengan demikian perempuan dapat menjadi subjek bagi dirinya dan dapat menjadi makhluk politik. Kesempatan ini akan membuka peluang besar bagi perempuan untuk melakukan pijakan awal yakni mengirimkan sebanyak-banyaknya perempuan untuk memenuhi kursi wakil rakyat. Jika keberadaan perempuan di pemerintahan bisa mencapai 50% maka akan mudah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ramah perempuan seperti yang terjadi di Swedia. Perubahan dimulai dari argumentasi menuju konstitusi, konstitusi berperan sebagai pelegalan argumentasi yang diwacanakan oleh para perempuan dalam legislatif tersebut. Hal ini akan memberi dampak yang sangat baik tidak hanya bagi kemajuan perempuan Indonesia dalam politik namun juga dalam bidang lain seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial dan lain-lain. Perempuan dari berbagai kalangan, status dan ras dirangkul dan mendapat penghargaan yang sama dengan laki-laki, disinilah keadilan tercapai, inilah yang disebut sebagai politik.

Perempuan sebagai *political being* yang penuh dalam demokrasi menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai, demokrasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki label muatan lokal di dalamnya dan label yang mendampingi di belakang nama demokrasi itu sendiri, seperti: demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin dan masih banyak lagi. Demokrasi dipenuhi oleh muatan lokal, secara sekilas hal ini dapat membedakan karakter antara demokrasi itu sendiri, antara yang satu dengan yang lainnya. Demokrasi yang ditawarkan disini tidak diberi label muatan lokal sebagai jalan upaya untuk mencapai pemahaman demokrasi yang universal. Demokrasi universal dikembalikan kepada hakikat dari demokrasi, yakni demokrasi yang *open* dan *empty*, demokrasi ini hadir bukan untuk masa yang akan datang melainkan ia hadir saat ini, digunakan pada masa ini untuk menghadapi masa ini dan masa datang. Sebuah demokrasi yang menuju telos keadilan dengan melegalkan sistem politik biseksual di

dalamnya. Demokrasi versi ini bersifat universal namun tidak mengabaikan partikularitas yang masuk ke dalamnya, jika politik cermin biseksual terarah dari dua bagian menjadi satu, maka begitu pula yang seharusnya terjadi dalam demokrasi ini, yakni partikularitas menuju universalitas, dimana tidak ada penindasan hak antara partikularitas tersebut.

Setiap budaya tentu memiliki kosa kata masing-masing yang berbeda satu sama lain dan apa yang terdapat pada budaya yang satu tentu akan berbeda maknanya dengan yang terdapat pada budaya yang lain. Akan tetapi, sebuah demokrasi yang diarahkan pada tataran universal bukanlah suatu hal yang utopia, hal ini terjadi karena didukung dengan kealamiahannya sifat yang dimiliki oleh manusia yakni *animal politics*. Muatan lokal masih dimungkinkan untuk dipakai sejauh muatan tersebut relevan dengan karakter universal dari demokrasi, pada intinya demokrasi harus dibawa pada telos keadilan secara universal tanpa ada lagi pembedaan gender didalamnya dan tidak ada lagi ketimpangan hak antara subjek politiknya.

